



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hari, Tanggal	: Rabu, 6 November 2019
Pukul	: 10.00 s.d Selesai WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP)
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK. IV) Gedung Nusantara Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Prioritas
Anggota yang Hadir	: 51 Anggota dari 52 Anggota FRAKSI PDI PERJUANGAN 1. SUDIN, S.E. 2. SUNARNA, S.E., M.Hum. 3. Drs. I MADE URIP, M.Si. 4. ONO SURONO, S.T.

5. H. YADI SRIMULYADI
6. Ir. MINDO SIANIPAR
7. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
8. VITA ERVINA, S.E.
9. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
10. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
11. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. H. DEDI MULYADI, S.H.
2. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.H.
3. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
4. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.
5. Ir. ICHSAN FIRDAUS
6. BUDHY SETIAWAN
7. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
8. ALIEN MUS

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
2. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
3. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
4. Ir. SUMAIL ABDULLAH
5. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
2. Drs. FADHOLI
3. H. SULAEMAN L. HAMZAH
4. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
5. YESSY MELANIA, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. DANIEL JOHAN, S.E.
2. H. MUHTAROM, S.Sos.
3. LULUK NURHAMIDAH, M.Si.
4. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.
5. EDWARD TANNUR, S.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Drs. GUNTUR SASONO, M.Si.
2. HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
3. MUSLIM, S.H.I, M.M.
4. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.

5. **BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.**

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

1. **Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.**
2. **Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**
3. **drh. SLAMET**
4. **H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**
5. **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

FRAKSI PARTAI Amanat Nasional

1. **MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.**
2. **HAERUDIN, S.Ag., M.H.**
3. **FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.**
4. **SLAMET ARIYADI, S.Psi.**

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan

1. **K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.**
2. **EMA UMIYYATUL CHUSNAH**

Anggota Yang Izin : **Ir. EFFENDI SIANIPAR**

Undangan : **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.) beserta jajaran.**

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sesuai dengan rapat-rapat DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR tanggal 18 Oktober 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019. Pada hari ini Rabu, tanggal 6 November 2019, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka pengenalan dan penjelasan Rencana Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Menurut laporan Sekretariat Komisi IV. Anggota yang sudah hadir 37 Anggota terdiri dari 9 Fraksi. Mudah-mudahan akan datang lebih dari 37. Anggota Komisi IV dan sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat kerja hari ini dimulai pukul 10.30 akan diakhiri pada pukul 13.00 WIB apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Perkenalan Anggota Komisi IV
3. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas Rencana Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didahului dengan perkenalan Menteri beserta jajarannya.
4. Tanggapan Anggota Komisi IV
5. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Kesimpulan
7. Penutup.

Apakah susunan acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang berbahagia

Indonesia adalah pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Sayangnya menurut rekor dunia, *Guinness of Book*, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 dari sisa hutan-hutan di dunia. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir berkurang dan tercatat luasan kawasan hutan Indonesia saat ini hanya tersisa 125 juta hektar. Jadi kalau ada yang nggak percaya, diukur ulang saja.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hutan berfungsi sebagai penyeimbang fungsi ekosistem. Peranan hutan sangat penting dalam sistem penyangga kehidupan. Hutan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan air yang sangat baik, sebagai habitat bagi flora dan fauna, mengurangi polusi pencemaran udara, sebagai penyubur tanah, sebagai paru-paru dunia dengan men-*supply* oksigen untuk kehidupan, menahan erosi, dan sebagainya.

Sesuai amanat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka hutan sebagai karunia dan amanah

Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Memiliki kedudukan peran sangat penting bagi kehidupan. Untuk itu, negara berkewajiban melindungi melalui penyelenggaraan kehutanan dengan mengelola dan memanfaatkannya secara berkesinambungan. Dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, social, budaya, serta ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada Rapat Kerja hari ini Komisi IV ingin mendapatkan gambaran umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

1. Visi Misi Pemerintah terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Profil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Rencana Strategis, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Tahun 2019-2024 bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jadi, Ibu jangan seperti yang lalu Bu. Yang lalu ada slogan, menanam pohon 1 miliar. Kalau nggak percaya jumlahnya hitung saja. Pada Rapat Kerja ini Komisi IV ingin mendapatkan masukan yang sangat berarti. Selanjutnya kami juga meminta penjelasan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. *Insyallah* Ibu, besok kami akan mengadakan kunjungan spesifik walaupun agak terlambat di 4 Provinsi yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
2. Status kebakaran. Status dari keberadaan 3 juta hektar kebun sawit dalam kawasan hutan. Pak Sekjen, sampai hari ini secara *detail* kami belum mendapatkan data secara *detail*. Cuma konon katanya, konon katanya karena setahu saya awal Gubernur Kalimantan Tengah menjabat, kami kesana. Gubernur mengatakan 850 ribu hektar di Kalimantan Tengah kebun sawit ilegal.
3. Tindak lanjut usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
4. Program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA
5. Dan yang terakhir, program Perhutanan Sosial. Karena ini banyak masukan, banyak yang mengkritik ke Komisi IV, TORA itu dikeluarkan apakah betul tanahnya ada atau tidak.

Saudari Menteri dan Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya sesuai acara yang telah kita sepakati, kami persilakan Anggota Komisi IV untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, Nomor Anggota, fraksi, dapil masing-masing. Setelah itu baru perkenalan Pimpinan Komisi IV. Dimulai dari jagoannya dari Golkar, Bu.

Silakan Pak Firman Soebagyo.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pak Sudin yang saya hormati dan selalu kita banggakan selaku Ketua Komisi IV beserta seluruh Pimpinan lainnya.

Bu Menteri beserta seluruh jajarannya.

Perkenalkanlah saya pendatang baru di Komisi IV walaupun orang lama. Nama saya Firman Soebagyo, belum dirubah Pak Sudin. Daerah Pemilihan Jawa Tengah III meliputi Kabupati Pati, Blora, Rembang, dan Grobogan. *Insyallah* saya di periode ini akan banyak bisa mendukung rencana kegiatan Pemerintah dan mudah-mudahan tidak dipindah lagi. Nomor Anggota saya 303. Pak Sudin, 303. Ini kalau kode kepolisian menarik Pak. 303 itu perjudian Pak kalau di kode polisi Pak.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadinya saya pikir sudah ganti nama jadi Firman Kardinal, ternyata masih Firman Subagyo.

Selanjutnya.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Perkenalkan Bu Menteri, Ono Surono anggota lama. Dapil Jabar VIII Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan yang saya hormati, seluruh Anggota yang saya hormati dan Bu Menteri beserta jajarannya.

Perkenalkanlah kami Bu, stok lama. Guntur Sasono dari Partai Demokrat, Nomor A556 Dapil VIII Jawa Timur. Jombang, Madiun, Nganjuk, dan Mojokerto.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saya Mindo Sianipar, PDI Perjuangan, Dapil Jatim VIII, Nomor Anggota A220, 220.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Beliau ini kalau disini dibilang penunggunya Komisi IV. Ini tahun ke-21. Selanjutnya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat kepada Bu Menteri, sama-sama Bu ini periode ke-2 kita di Komisi IV. Nama saya Andi Akmal Pasluddin, Fraksi PKS, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Pare-Pare.

Terima kasih Ketua.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin Pak Ketua.

Saya Salim Fakhry, Dapil Aceh dari Fraksi Golkar, Nomor Anggota A 265.

Terima kasih.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.):

Selamat pagi.

Terima kasih Pak Ketua, dan Bu Menteri.

Perkenalkan nama saya Vita Ervina, saya periode pertama pada kali ini dan juga di Komisi IV. Saya dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Temanggung, dan juga Wonosobo. Saya Nomor Anggotanya A 193.

Terima kasih.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Oke, baik terima kasih Bapak Pimpinan beserta Wakil Pimpinan.

Dan izin Ibu Susi, Ibu Menteri eh Ibu Susi. Maaf Ibu Siti Nurbaya. Maaf Ibu. Jadi masih ingat ini yang lalu. Milenial. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Siti Nurbaya dan Bapak Alue Dohong khususnya, Bapak berhasil membuat masyarakat Kalimantan, sebagai Putra Kalimantan umumnya bisa disejajarkan menjadi kabinet di Jokowi Jilid II ini Pak.

Dan perkenalkan, saya Yessy Melania dari Dapil Kalimantan Barat II Fraksi Partai Nasdem, Nomor Anggota 389, Dapil II Kalbar ini ada 5 Kabupaten dari Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Baik, terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Bu Menteri, Saya Sutrisno A 174 dari PDI Perjuangan, Dapil Jabar IX, Majalengka, Sumedang, Subang.

Terima kasih.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bu Menteri beserta jajarannya, Pimpinan, dan anggota Komisi IV yang berbahagia.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Nama saya Abdullah Tuasikal, Nomor Anggota 403 Dapil Maluku, Fraksi Nasdem.

Terima kasih.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta Anggota.

Ibu Menteri beserta jajaran.

Nama saya Budhy Setiawan, Fraksi Partai Golkar, Nomor keanggotaan A 290, Daerah Pemilihan Jawa Barat III mencakup Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Ketua dan Ibu Menteri, serta seluruh hadirin yang saya hormati.

Perkenalkan nama saya Sumail Abdullah, *new comer*, orang baru di Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra A 108 Daerah Pemilihan Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso.

Terima kasih.

F-PAN (FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Bu Menteri yang saya hormati beserta jajarannya.

Nama saya Fachry Pahlevi Konggoasa dari Partai Amanat Nasional, Nomor Anggota A 519, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara meliputi 17 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara.

Terima kasih

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan yang saya hormati khususnya Pak Sudin dan Ibu Menteri beserta jajarannya.

Nama saya Bambang Purwanto, Nomor Anggota 567, dari Fraksi Demokrat, perwakilan dari Dapil Kalimantan Tengah.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Ibu Menteri beserta segenap jajaran yang kami hormati.

Perkenalkan nama saya Hamid Noor Yasin, Fraksi PKS, Nomor Anggota 441 dari Dapil Jawa Tengah IV meliputi Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar.

Terima kasih Ketua.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau ini temannya, ini temannya Ibu Menteri ini. Duduk Pak.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bapak Pimpinan, dan Bapak Ibu Anggota yang saya hormati.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Memperkenalkan nama saya Fadholi, partai dari Fraksi Partai Nasdem, dari Dapil I Jawa Tengah meliputi Kabupaten Tegal, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang biar nanti bisa dicatat dengan baik oleh para Dirjen. Komisi saya IV, Ketua Komisi Bapak Sudin dan Menteri saya adalah Ibu Menteri Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan. Mudah-mudahan suasana baru, Menteri baru, akan membawa semangat baru dan membuahkan satu kemaslahatan yang baik untuk umat dan tidak terlupakan juga untuk seluruh anggota Komisi IV.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Sulaeman, ini juga dari partainya Ibu, sama.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati

Ibu Menteri dan seluruh jajaran

Saya Sulaeman Hamzah, Nomor Anggota 406, Daerah Pemilihan Papua.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi para Dirjen saya hanya mengingatkan jangan kelakuannya seperti mau ngomongin. Setelah ada pertanyaan dari Anggota, ditulis sampai diluar disobek. Ini pengalaman Beliau waktu jadi Dirjen.

Silakan Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pak Ketua, para Anggota, Bu Menteri, Pak Wakil, teman-teman Eselon I dan seluruh Anggota yang saya hormati.

Kalau di Kehutanan nama saya Darori, disini sama Pak Sudin ditambah Wonodipuri gitu, jadi Darori Wonodipuro. Saya kira orang lama, saya dari Dapil VII Jawa Tengah dari Fraksi Gerindra. Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Dan semoga Bu Menteri dan Pak Wakil dapat mendapatkan amanah dengan baik.

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Pak Ketua dan jajaran Pimpinan yang saya hormati.

Ibu Menteri dan jajarannya.

Perkenalkan saya Yohanis Fransiskus Lema, biasa dipanggil Anis Lema dari Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II meliputi 12 Kabupaten/Kota tersebar di 4 pulau. Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Rote, dan Pulau Sabu.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Yang saya hormati Bu Menteri beserta dengan jajaran pejabat Eselon I

Perkenalkan nama saya Suhardi Duka, ada dukanya tapi tidak sedih. Daerah Pemilihan saya Sulawesi Barat, di Komisi IV ini baru kali ini masuk Sulawesi Barat. Banyak juga kawasan hutan disana Bu. Meliputi 6 Kabupaten. Hanya 4 kursi yang diperebutkan. *Alhamdulillah* kita dapat 1 kursi dari Fraksi Partai Demokrat. Prinsip, kami siap bekerjasama dengan Ibu Menteri.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang kami muliakan.

Bu Menteri yang kami hormati.

Izin memperkenalkan. Nama saya T.A Khalid, Fraksi Partai Gerindra, Nomor Anggota A 60, Dapil Aceh II.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Pak Ketua, para Wakil Ketua yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi IV.

Bu Menteri, Pak Wakil Menteri dan seluruh jajaran.

Perkenalkan nama saya Johan Rosihan, Nomor Anggota A 451 dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Nusa Tenggara Barat I. Salam dari Tambora Bu. Bu Menteri ada salam dari Pak Gubernur NTB, *Insyallah* di bulan Desember kita akan canangkan penanaman 1 juta pohon di Nusa Tenggara Barat, mohon dukungan dan partisipasi.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-PKS (drh. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati

Ibu Menteri beserta jajaran yang juga saya hormati.

Perkenalkan nama saya Slamet dari Fraksi PKS, Nomor Anggota 431 dari Dapil Jawa Barat IV Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mba Riezky

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat datang Ibu Menteri, Bapak Wamen beserta jajarannya.

Terima kasih Pimpinan.

Perkenalkan saya Riezky Aprilia biasa dipanggil Kiki dari Dapil Sumatera Selatan, Nomor Anggota 147, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Ketua dan Wakil Ketua Komisi yang saya hormati beserta Anggota DPR Komisi IV

Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri beserta jajarannya.

Perkenalkan nama saya Nur'aeni bukan Ibu Siti Nurbaya. Sama Nur nya ya Bu ya? Saya dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Banten II meliputi Kabupaten Serang serta Cilegon, nomor A 561. Dan mudah-mudahan kita bisa bermitra serta bersinergi Bu Menteri dengan Komisi IV.

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat pagi salam sejahtera untuk semua.

Yang terhormat Bapak Ketua dan semua Pimpinan Komisi IV, juga Ibu Menteri dan Bapak Wamen dan semua rombongan yang di bawa, dan Bapak Ibu sekalian.

Perkenalkan nama saya Luluk Nurhamidah, kelahiran dari Jombang, dari Fraksi Partai PKB, Nomor Anggota A 20, dapil saya Jawa Tengah IV meliputi Kabupaten Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar. Kita akan berjuang bersama-sama Bu.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Salam sejahtera, om swastiatu, namo buddhaya.

Pak Ketua yang saya hormati beserta jajaran Anggota Dewan yang terhormat.

Dan Ibu Menteri yang saya cintai beserta jajarannya.

Terima kasih Bu, Ibu telah membawa kaum kami, perempuan, untuk duduk di depan. Jadi saya sangat *appreciate*. Nama saya Endang Thohari

mewakili Dapil Jabar III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, kemudian Nomor Anggota saya A 84 dari Partai Gerindra. Terima kasih, semoga Ibu beserta kaum perempuan yang ada di jajarannya bisa melestarikan hutan kita.

Terima kasih.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bapak Ketua beserta para Wakil Ketua.

Yang kami hormati Ibu Menteri beserta jajarannya.

Bapak Ibu sekalian.

Perkenalkan nama saya Ema Umiyyatul Chusnah, Nomor Anggota A 471 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kota Madiun, dan Kabupaten Kota Mojokerto. *Alhamdulillah* saya juga asli dari Jombang.

Terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PG (ALIEN MUS):

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan beserta Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Ibu Menteri dan Pak Wamen beserta jajarannya.

Saya Alien Mus, Fraksi Partai Golkar, Dapil Maluku Utara. *Insyallah* dengan Ibu menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lingkungan kita di Indonesia masalahnya bisa tercapai.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang paling ujung Mba Farida.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat pagi semuanya.

Perkenalkan nama saya Farida Hidayati, Nomor Anggota A 47, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, saya Dapil IX Jatim yang meliputi Tuban dan Bojonegoro.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Doktor, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Bu.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Yang kami hormati Ketua, Pimpinan, Anggota dan Bu Menteri bersama jajarannya.

Saya, nama Hermanto Bu, belum berubah sampai sekarang. Kami menyampaikan selamat kepada Bu Menteri yang diamanatkan kembali Menteri Lingkungan dan Kehutanan kembali. Tentunya ini adalah *surprise* buat Bu Menteri. Selamat bertugas Bu Menteri. Demikian.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):

Assalamualaikum, Wassalamu'ala manittabaal huda

Saya Asep Ahmad Maoshul Affandy dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor Anggota 464, berasal dari Dapil Jabar X dari daerah KunCi BanDar. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Ibu, terpilih kembali tentu saja ini bukan sekedar kepercayaan tapi ini lebih dari kepercayaan bisa terpilih kembali. Semoga sukses.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Ketua yang saya hormati

Ibu Menteri beserta jajaran.

Perkenalkan saya, nama saya Panggah Susanto temannya Pak Bambang dari Fraksi Partai Golkar, Nomor Anggota A 306 dari dapil VI Jawa Tengah meliputi Magelang, Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Saya kira senang kita bisa ketemu di posisi yang berbeda. Ibu, saya kira nanti kita bisa dapat saling melengkapi dan sinergi dalam rangka untuk membangun sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Panggah selalu mengatakan beliau dulu disini. Sekarang duduk disini jadi boleh marahin eksekutif.

Selanjutnya Pak Sunarna.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pak Ketua dan seluruh Pimpinan dan rekan-rekan Anggota yang saya hormati yang banggakan.

Ibu Menteri, Pak Wamen juga Pak Sekjen beserta seluruh Pejabat Kementerian LHK yang saya hormati yang saya banggakan.

Pertama, selamat kepada Bu Menteri, luar biasa bisa terpilih menjadi Menteri kembali. Ini Bu ini, luar biasa. Kalau orang Jawa bilang itu *balungane balungan gajah*, jadi tulangnya tulang gajah, gede. Jadi top luar biasa. Kami nama Sunarna Bu, tapi saya lahir dan besar di Klaten Bu. Kenapa harus pake A nggak pake O Bu? Karena saya orang Sunda Bu, jadi gabungan itu kitra-kira begitu. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan, Nomor A 197.

Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Dapil saya, dapil Banyumas, Cilacap Ibu. Merdeka!

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua

Rahayu, rahayu, sabung pemadi, sampurasun

Bu Menteri, Bapak Wamen, Pimpinan, Anggota semua.

Saya perkenalkan Bu Menteri. Nama saya Haerudin, dari Dapil Jabar XI Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Selamat pagi untuk kita semua

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta para Anggota DPR yang hadir.

Ibu Menteri beserta jajarannya.

Nama Saya Edward Tannur, saya dari Fraksi PKB, Dapil NTT II. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu beserta jajarannya ini kita bisa membangun kerjasama dan sinergitas untuk kemajuan Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Bang Muslim

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Ya, terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua, Pimpinan Komisi IV dan Anggota

Ibu Menteri, jajarannya

Nama saya Muslim Bu Menteri, dari Fraksi Partai Demokrat. Daerah Pemilihan Aceh II. Selamat buat Bu Menteri, tentu harapan saya kebetulan dari Dapil Aceh, Bu Menteri ini mudah-mudahan banyak persoalan lingkungan di Aceh ini menjadi prioritas Bu Menteri, tentu menjadi masukan juga nanti buat kami akan sampaikan ke Bu Menteri.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PAN (MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pak Sudin, Pimpinan, dan teman-teman Komisi IV yang saya hormati.

Bu Menteri dan jajaran

Saya H. Muhammad Syafrudin, Fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor Anggota A 511.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih Ketua

Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Izin memperkenalkan diri kembali walaupun yang periode yang lalu sudah kenal tapi kewajiban di dalam pertemuan pertama periode ini harus memperkenalkan diri. Nama Endro Hermono, Nomor Anggota 111, dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur IV meliputi Blitar, Tulungagung, dan Kediri.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Yang terhormati Ketua, para Wakil Ketua Komisi IV, dan anggota Komisi IV.

Yang terhormat Ibu Menteri dan Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nama Muhtarom, Nomor Anggota A 45 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yaitu Kota Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Kota Kabupaten Mojokerto. Pernah ketemu Ibu dengan suasana yang berbeda di waktu realisasi *social forestry*.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Kang Yadi

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Terima kasih Ketua

Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Perkenalkan nama saya Yadi Srimulyadi, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jabar II Bandung dan Bandung Barat.

Terima kasih.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om swastiastu

Bapak Ketua dan Pimpinan, Anggota Komisi IV yang saya hormati

Rekan-rekan Anggota Komisi IV

Ibu Menteri beserta Bapak Wamen dan seluruh Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perkenalkan nama saya Made Urip Pak, saya Dapil Bali dari PDI Perjuangan. Saya stok lama ini Bu jadi barang karatan, kalau di partai itu

banteng tua itu Bu. Jadi terima kasih, mudah-mudahan Ibu sukses selalu beserta seluruh jajarannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini banteng tua tapi nyeruduk nya lebih jago Bu.

Silakan yang terakhir.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bu Menteri, Pak Wamen, Pak Kepala BRG,

Pak Kepala BRG masih ya? Iya? Pak Kepala BRG? Nama saya Ichsan Firdaus, saya dari Fraksi Partai Golkar. Tugas saya di Daerah Pemilihan menjaga rumahnya Ibu Menteri daerah Kabupaten Bogor, jangan lupa Dapil Ibu juga.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya kita perkenalkan Pimpinan. Sana, di sini dulu gantian.

F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Sampurasun. Dedi Mulyadi. Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bekasi. Sudah tahu pasti, Fraksi Golongan Karya.

Terima kasih

F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Fraksi Partai Nasdem, Dapil II Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten dan Kota. Hasan Aminuddin.

WAKIL KETUA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Salah sejahtera, *Shalom, Om swastiastu.*

Perkenalkan Budisatrio Djiwandono, Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Bu Menteri yang saya hormati selamat datang kembali dan kepada Pak Wamen selamat datang kembali juga Pak. Kami sangat berbahagia pada pagi hari ini kami mengundang mitra kerja kami, lingkungan hidup dan kehutanan, begitu Pak Ketua ya? Bukan cuman kehutanan, lingkungan hidup dan kehutanan. Moga-moga 5 tahun kedepan kita bisa bekerjasama. Tadi catatan dari Ketua Pak Sudin, hutan Indonesia hutan tropis ke-3 terbesar di dunia tetapi ada catatan bahwa deforestasi kita salah satu juga yang tercepat. Moga-moga dengan kembalinya Bu Menteri dan juga Pak Wamen kita bersama-sama menjaga hutan di Indonesia dan juga melestarikan lingkungan hidup supaya kita bisa mengasih, memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu kita.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh, salam sejahtera.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Saya rasa kalau saya memperkenalkan diri nanti sudah bosan tapi kalau tidak memperkenalkan diri nanti gak tahu. Saya Sudin, Nomor Anggota A 151, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Lampung I. Dulu saya sama Ibu Menteri sama-sama Caleg, cuma beliau nasibnya lebih bagus jadi Menteri, saya cuma tukang *getok* palu sekarang. Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Menteri untuk memperkenalkan diri beserta jajarannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait Rencana Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Silakan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Shalom, Om swastiastu.

Yang kami hormati Pimpinan dan Pimpinan Komisi IV DPR RI

Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI

Pertama kami menyampaikan syukur kepada Tuhan bahwa hari ini untuk pertama kali kita melaksanakan rapat kerja atas undangan DPR RI tanggal 1 November.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas undangan rapat kerja ini dan atas ucapan selamat dan doa-doa yang baik bagi kami dan Pak Wakil Menteri. Dan izinkan sesuai agenda kami memperkenalkan dulu kepada yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI tentang jajaran Kementerian LHK dan nanti mohon izin BRG mungkin memperkenalkan sendiri ya.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati

Saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Siti Nurbaya

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan Susi, Bukan Siti.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Namanya Sumatera Barat tapi aslinya sebetulnya Lampung dan Betawi. Saya sekarang mendapat mandat lagi untuk melaksanakan tugas dan terima kasih selama ini Komisi IV DPR RI telah memberikan bimbingan dan arahan atas berbagai kegiatan dari Kementerian. Saya mohon izin juga intrupsi, bagusnya saya yang kenalin atau sendiri? Saya yang kenalin.

Mohon izin kami memperkenalkan Bapak Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya juga mohon izin memperkenalkan Sekretaris Jenderal Pak Bambang Hendroyono, kemudian Pimpinan Inspektur Jenderal kami sudah purna tugas jadi sekarang Plt dirangkap oleh Staf Ahli Menteri Ibu Yanti Laksmidwiyanti. Kemudian para Dirjen adalah: satu, Dirjen Planologi yaitu Pak Sigit Hardminato, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, kemudian Pak Wiratno Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kemudian Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung ini juga purna tugas. Jadi karena waktu itu sebelum 6 bulan jadi saya tidak bisa mengusulkan penggantian jadi sekarang masih di Plt kan oleh Staf Ahli Menteri Pak Hudoyo.

Ini Staf Ahli Menteri bidang Energi. Kemudian Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, ini juga sudah purna tugas jadi kami meminta ini Plt dirangkap oleh Pak Sekjen, Pak Bambang Hendroyono. Kemudian Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu Pak Karliansyah, Pak Karliansyah. Kemudian Pak Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya yaitu Ibu Rosa Vivien Ratnawati. Kemudian saya mohon izin Pak Ruandha Agung sedang *pre-COP meeting* di Roma, kemarin jadi saya tugaskan kemarin sudah jalan. Kemudian Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bapak Bambang Supriyanto, Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Rasio Rido Sani, kemudian Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LHK Pak Helmi Basalamah dan satu lagi saya juga mohon izin Kepala Badan Litbang dan Inovasi Pak Agus Justianto sedang tugas di Slovenia untuk tim panel *resources*.

Saya mohon izin melanjutkan perkenalan untuk para Staf Ahli Menteri yaitu: pertama, Ibu Winarni Manoarfa. Bu Win ada ya? Oh sedang tugas. Kemudian Pak Hudoyo tadi yang merangkap Staf Ahli Menteri Bidang Energi. Bu Laksmi Wijayanti yang tadi merangkap, beliau adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam. Kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Pangan juga ini kosong, kami Plt kan kepada Ses Ditjen PSKL Pak Apik Karyana. Kemudian Ibu Laksmi Dewanti Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional. Jadi Kementerian ini termasuk Kementerian besar dengan 18 orang Eselon I.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat

Mohon izin itu perkenalan awal, Pak Nasir silakan. Mohon izin Ketua

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Lanjut.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Izin Bu.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan

Yang kami banggakan Anggota Komisi IV

Yang terhormat Bapak Ibu

Ibu Menteri yang saya hormati, Pak Wamen.

Perkenalkan saya Nasir Fuad, Kepala Badan Restorasi Gambut bertugas hampir 4 tahun di BRG.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Nasir, tolong teman-teman kan baru ini. Tolong apa fungsinya Bapak ini? Karena saya yakin banyak yang belum paham.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dibentuk oleh Pak Presiden pada tanggal 6 Januari 2016 dengan tugas sesuai PerPres Nomor 1 Tahun 2016 itu mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan restorasi gambut. Ada 14,9 juta hektar lahan gambut yang di Indonesia dan lebih dari setengahnya itu dalam keadaan yang memang terdegradasi atau sudah tidak berupa hutan rawa gambut yang alami. BRG dibentuk untuk bekerja di 7 Provinsi dengan luas gambut sebesar 12,9 juta hektar. Jadi tidak di seluruh provinsi di Indonesia hanya 7 Provinsi yakni: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua. Untuk membantu memfasilitasi, mengkoordinasikan kegiatan restorasi gambut, membasahi kembali gambut juga membantu tentu petani-petani di kawasan-kawasan gambut, di desa-desa gambut agar bisa melakukan budidaya pertanian atau perikanan, perkebunan, kehutanan sesuai dengan kaidah ekosistem gambut. Jadi gambutnya bisa basah lestari, kehidupan petani pun bisa terangkat. Ini tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada BRG dan BRG berfungsi, bekerja untuk 5 tahun hingga Desember 2020.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Menteri saran saya Eselon I yang kosong segera diusulkan supaya kerjanya lebih cepat sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Kami laksanakan, kita sudah mempersiapkan panselnya dan minggu depan sudah dimulai untuk seleksi dan mutasinya.

Terima kasih Pimpinan

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua interupsi sebentar boleh? Pak Ketua mohon izin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Interupsi atau nanya?

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Interupsi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke silakan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua yang saya hormati

Bu Menteri.

Saya hanya ingin menegaskan kalau nggak, kalau periode lalu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan selalu ada di oper di dua Komisi, Komisi IV dan Komisi VII. Berdasarkan Rapat Paripurna kita itu memutuskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada di Komisi IV saja. Kita ingin menegaskan itu dan Bu Menteri, Pak Wamen saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa kita juga berkaitan dengan bukan hanya kehutanan tetapi lingkungan hidup. Mudah-mudahan, saya yakin juga Bu Menteri senang juga kalau itu di Komisi IV, saya tahu juga itu, senang. Karena nggak usah bolak-balik antara 2 Komisi, kecapekan kasihan.

Terima kasih. Itu saja saya ingin tegaskan

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Ichsan. Dilanjut Bu Menteri dengan penjelasannya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih

Pak Ketua, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati

Dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Berdasarkan surat DPR RI tanggal 1 November izinkan dan sesuai dengan agenda tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ketua, saya mohon izin untuk melaporkan hal-hal berkenaan dengan: pertama, Kementerian LHK dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 tahun, lalu tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 termasuk mandat dan perintah untuk penganggaran di tahun 2020 dan kami juga ingin melaporkan sedikit tentang realisasi dan nanti kami akan menyampaikan dan melaporkan hal-hal yang tadi ditanyakan oleh yang terhormat Pimpinan.

Baik, pada bagian yang pertama terkait dengan oh mohon izin saya melaporkan bahwa kami sudah menyampaikan dokumen tertulis dan nanti mungkin akan secara cepat kami sampaikan *highlight* nya kemudian nanti ada juga dokumen lain yang kami susun berkenaan dengan hal-hal yang kami antisipasi tetapi kelihatannya nanti akan kami susulkan sebagai laporan tertulis bagi apa namanya gambaran umum bagi yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI dan yang terhormat Pimpinan.

Pada bagian pertama berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan RPJMN Jangka Menengah buku 4 untuk tahun 2020 sampai 2024 izinkan kami menyampaikan hal-hal berikut:

1. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RPJMN 5 tahun 2020 sampai dengan 2024 arahnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. Percepatan pembangunan di berbagai bidang dan dengan bobot yaitu pada menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah dan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pada *screen* 6, mohon periksa Bapak Ibu yang kami hormati. Sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dalam lingkup pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menyangkut terwujudnya bangsa yang berdaya saing. Jadi, kalau kita lihat di kotak pertama kira-kira isinya berkenaan yang terkait dengan LHK dan sangat nyata relevansinya yaitu berkaitan dengan lapangan kerja, kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia terutama di kawasan hutan dan di desa hutan, kemudian lagi yang penting adalah masyarakat sadar lingkungan serta konservasi sumber daya

alam terutama khususnya sumber daya air. Kalau kita lihat pada bagian terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari maka ini dikaitkan dengan tata kelola sumber daya alam dan dukungan untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial. Jadi, disitu ditekankan soal terpeliharanya sumber daya alam dan ekosistem. Jadi, menyangkut bukan hanya ekologi tetapi juga sistem sosial yang ada didalamnya dan juga bahwa keanekaragaman hayati yang harus dijaga. Kemudian adanya berbagai nilai tambah yang nyata untuk meningkatkan daya saing sebagai keunggulan Indonesia. Kemudian yang penting lagi pada arah jangka panjang Indonesia asri dan lestari ini yaitu berkaitan dengan persepsi tentang lingkungan dan kesadaran masyarakat untuk kelestarian lingkungan hidup.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Pada *screen* 7 itu dirangkum pada rencana pembangunan jangka menengah yang buku 4 untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu berkenaan dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pada konteks ini KLHK konteksnya pada peningkatan kualitas sumber daya air. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan pengembangan wilayah, menjamin pemerataan, mengatasi kesenjangan yaitu berkenaan dengan penyiapan untuk pengembangan wilayah termasuk yang rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Kemudian berkenaan dengan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, produktivitas dan daya saing serta membangun lingkungan hidup dalam konteks juga meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan terhadap akibat perubahan iklim.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Maka sebagai uraiannya mohon periksa pada halaman 8. Di sini memperkuat ketahanan ekonomi tadi sudah kami sampaikan berkenaan dengan ketersediaan air, lapangan kerja, investasi sektor riil, pengentasan kemiskinan, produktifivitas dan daya saing serta ketahanan bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah dalam kaitan ini maka berbagai uraian untuk program kegiatan, kegiatan prioritas, dan proyek prioritasnya mohon periksa pada halaman 9 dan 10 yaitu seperti misalnya pemantapan kawasan hutan yang memiliki indek jasa lingkungan tinggi untuk kawasan lindung air. Misalnya hutan-hutan Papua, Kalimantan, dan beberapa tempat termasuk tadi Sulawesi Barat, itu juga termasuk yang tinggi harus di terus dijaga walaupun secara keseluruhan kawasan hutan itu harus kita jaga.

Kemudian penguatan kesatuan pengelolaan hutan. Kalau lihat sebaran hutan kita yang sampai 120 juta hektar lebih maka posisi kelembagaan, kesatuan pengelolaan hutan di tingkat tapak memang harus diperkuat sehingga pada bagian lapangan kita bekerja keras dan itu sesuai arahan Bapak Presiden bahwa jangan di pusat saja begitu jadi lebih banyak harus

dikontrol sampai ke lapangan. Pada program ini juga yang penting adalah rehabilitasi hutan dan lahan serta penyelamatan danau. Bapak Ibu termasuk danau ini pada waktu yang lalu banyak ditangani di Komisi VII tetapi sebetulnya penanganan danau juga ditangani oleh Kementerian PU. Jadi ada beberapa *subject* yang kita terkait lalu ditangani juga oleh Kementerian lain seperti danau, sumber daya air, sampah, juga IPAL dan lain-lain juga ada penanganannya yang di Kementerian PUPR jadi di kita berbagi skala dan orientasi. Misalnya terkait dengan sikap, dengan penyuluhan, ataupun pembangunan skala kecil sebagai contoh itu di KLHK tapi kalau sudah gede-gede misalnya tempat pembuangan sampai yang investasinya sampai puluhan miliar itu ada di Kementerian PU.

Selanjutnya peningkatan di halaman 10. Peningkatan industri pengolahan kemudian peningkatan daya saing. Nah dalam kaitan ini, peningkatan daya saing bagi kepentingan Indonesia yaitu ditekankan pada terutama industri pariwisata. Untuk tahun sampai tahun 2020 perintah Bapak Presiden harus sudah jadi yaitu untuk kawasan wisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika NTB, dan di Kupang, Sulawesi Utara. Masih ada 6 lagi yang akan dilanjutkan tapi harus jadi dulu untuk yang 4 ini. Jadi, berbagai kegiatan kita ada orientasi kesana.

Kemudian di halaman 11, yaitu berkenaan dengan pembangunan wilayah. Dalam hal ini kaitan dengan pemindahan ibukota negara, Kementerian LHK bertugas untuk termasuk penyiapan di kawasan bahwa Presiden menegaskan bahwa pemindahan Ibukota negara harus selaras dan sejalan dengan langkah-langkah pemulihan lingkungan dan peningkatan kekuatan untuk konservasi. Jadi, misalnya ibukota nanti modelnya adalah model *bush capital*. Jadi, kota tapi hutannya tidak terganggu. Nah saat ini kita sudah mengikuti dengan kajian hidup strategis dan kami proyeksikan pada bulan November ini atau Desember itu sudah harus diselesaikan karena dari dasar itu kajian lingkungan hidup strategis itu menyangkut kerangka kebijakan, rencana, dan program yang nanti akan menjadi pertimbangan juga bagi Bappenas, bagi ATR dan lain-lain yang menangani tentang pemindahan ibukota negara ini.

Selanjutnya pada bagian arahan pembangunan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebetulnya yang paling penting disini adalah bahwa cukup besar, cukup besar masyarakat kita yang berada di kawasan hutan dan/atau di sekitar kawasan hutan yaitu sekitar 25 ribu desa. Dan dia oleh Pemerintah diorientasikan dengan program perhutanan sosial dan juga reforma agrarian. Ada perbedaan antara reforma agrarian dan perhutanan sosial yaitu reforma agraria adalah kawasan hutan yang sudah tidak berhutan dan fungsi hutannya sudah melemah itu bisa di konversi untuk

keperluan bagi masyarakat bagi keperluan yang lain sedangkan ini kemudian nantinya akan menjadi sertifikat. Jadi dari kita, dari Kementerian LHK namanya tanah objek reforma agraria. Tadi seperti yang ditanyakan oleh yang terhormat Pimpinan. Jadi nanti kami akan elaborasi sedikit pada bagian akhir. Sedangkan perhutanan sosial adalah kegiatan dari masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan, berada di kawasan hutan negara sehingga hutannya tidak bisa dilepaskan, dia masih ada fungsi hutan ada diantaranya memang yang sudah melemah tapi dengan kegiatan perhutanan sosial, *agroforestry* dan lain-lain fungsi hutannya tetap masih bisa di *upgrade* tetapi masyarakatnya tetap bisa hidup dan bisa secara terhormat sebagai warga negara berada disana.

Saya kira sudah banyak contohnya nanti kami juga akan melaporkan bagaimana progresnya. Sejalan dengan itu dalam konsep perhutanan sosial ini juga dan juga dalam industri maka vokasional *training* atau pelatihan vokasi untuk lingkup Kementerian LHK juga besar karena misalnya juga ada fungsi-fungsi petugas teknis, tenaga teknis, ganis-ganis di industri-industri kayu terutama yang kecil-kecil yang di Pulau Jawa sangat banyak karena industri kayu di Pulau Jawa bertumbuh begitu pesat dengan volume dibawah 6 ribu meter kubik. Jadi pesat sekali terutama di Jawa Tengah dan sebagian di Jawa Timur.

Bapak Ibu yang kami hormati

Selanjutnya berkenaan dengan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Saya mohon izin ini juga sekaligus bisa merespon yang disampaikan yang terhormat Pak Budi Satrio bahwa inilah bagian yang banyak di bahas, diarahkan oleh Komisi VII yaitu berkenaan dengan pencegahan, pencemaran, dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang meliputi aspek-aspek pemantauan kualitas udara, air, dan air laut kemudian pemantauan pengelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan, pencegahan kebakaran lahan dan hutan, peningkatan kesadaran, ini semacam *public campaign* jadi kita kalau di lingkungan itu memang rumus utamanya adalah *public campaign*. Jadi kampanye kepada publik, pemahaman oleh publik sehingga menimbulkan kesadaran. Kemudian penanganan pencemaran, pengurangan sampah rumah tangga dan sampah plastik, penghapusan dan penggantian merkuri serta penanganan limbah B3 dan limbah medis.

Dalam peningkatan kualitas lingkungan beberapa kegiatan juga seperti restorasi dan pemulihan lahan gambut. Badan Restorasi Gambut, Pimpinan, adalah sebetulnya fungsi *government* dari Direktorat Pemulihan Gambut yang ada di PPKL. Direktorat ini sekarang masih ada juga bekerja sangat efektif. Bedanya dengan BRG adalah, BRG bekerja di 7 Provinsi. Dia semacam percepatan ketika kita punya *problem* yang berat di 2015 untuk kebakaran

hutan dan lahan. Jadi ini, ini sudah berlangsung jadi sedang bersama-sama. Dalam kaitan ini juga mohon izin kami melaporkan bahwa terkait dengan lingkungan ada persoalan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3. Jadi ini juga bagian dari upaya untuk kita mengatasi kualitas lingkungan hidup, juga kualitas air sungai dan danau, kemudian pemulihan habitat spesies terancam punah dan sebagainya dan juga aspek-aspek regulasi penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Selanjutnya kami mohon izin melaporkan dalam kaitan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas pada dasarnya mohon periksa pada halaman 16 yaitu berkenaan dengan verifikasi kawasan untuk perencanaan planologi kehutanan, inventarisasi keanekaragaman hayati dan juga pengendalian pemanfaatan kawasan oleh korporasi skala besar dan penetapan kawasan hutan dan berbagai pendataan inventarisasi. Selanjutnya juga di halaman berikut berkenaan pemantapan kawasan fungsi lindung dan juga peningkatan di halaman 18 yaitu peningkatan kuantitas dan ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jadi ini isinya berkenaan dengan langkah-langkah untuk pengembangan IPTEK, hasil hutan, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati dan produksi hasil hutan bukan kayu. Jadi kedepan selain kayu juga banyak hasil hutan bukan kayu saya kira ada bambu, rotan, itu yang akan diintensifkan. Kemudian juga ada madu, gaharu, dan berbagai jenis lainnya. Kalau yang di Jawa terutama getah-getah pinus di Lampung juga banyak. Damar dan sebagainya. Itu sebagian hasil hutan bukan kayu dan juga sebetulnya ada yang disebut *bioprospecting* jadi dari keanekaragaman hayati yang sebetulnya nilainya sangat tinggi. Itu sudah bisa mulai dieksplorasi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Menteri, Bu Menteri izin.

Jadi, Damar Mata Kucing itu adalah salah satu tanaman pohon langka di dunia. Saat ini di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat sudah banyak yang ditebangi. Jadi mohon nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau paling nggak diinventarisasi ada berapa banyak pohon-pohon yang sudah sekian ratus tahun itu karena ini salah satu pohon yang langka.

Terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira ini di KSDAE masuk dalam habitat yang spesiesnya mengalami ancaman untuk dilindungi jadi saya kira segera saja ditinjau di lapangan.

Terima kasih Pak Ketua.

Selanjutnya berkenaan dengan nilai tambah lapangan kerja dan investasi maka pada *screen* 20 pada halaman 20 langkah-langkah untuk pengolahan berbasis pertanian, pengolahan industri kehutanan, kayu, ekowisata. Ini juga kalau kita lihat secara umum hutan-hutan dan bentang alam kita sangat indah jadi ketika ada akses jalan yang baik terutama di pulau Jawa ataupun di beberapa tempat di Sumatera yang aksesibilitasnya baik terus dia jadi ekowisata dan itu itu sangat baik. Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya terkait dengan lingkungan, kita memproyeksikan bahwa di setiap lekukan sungai atau kita sebut *meandering* itu sebetulnya juga tempat yang indah tapi sering menjadi tempat buangan sampah dan juga terjadi banyak pencemaran sungai disitu. Itu juga bisa ditata dengan *biocord* jadi dengan dana yang kira-kira 900 juta sampai dengan 1,2 miliar itu sudah bisa jadi tempat yang ditata dengan baik, bisa dikelola oleh karang taruna dan sebagainya. Tempat seperti ini sangat banyak dari konteks lingkungan airnya sebetulnya memang sangat potensial untuk ditangani dan bisa sekaligus memulihkan lingkungan menjadi indah.

Oleh karena itu Pimpinan yang kami hormati, izinkan saya untuk *appeal* dan nanti mohon bimbingan dan arahan kiranya kalau sektor kehutanan saya kira dukungan dananya cukup besar termasuk rehabilitasi hutan dan lahan sampai 2 triliun. Tetapi yang lingkungan ini masih kecil-kecil. Yang untuk peningkatan kualitas air, sungai, udara, dukungan dananya masih sangat kecil dan nanti kita lihat secara konsep seperti apa bila Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat sudah melihat itu dan nanti kita coba kembangkan lagi seperti apa lingkungan kita ini harus secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya dipulihkan.

Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati

Berkenaan dengan pemindahan ibukota negara kami mohon diperiksa pada halaman 22. Jadi, tadi seperti yang saya laporkan dan berkenaan dengan pengentasan kemiskinan mohon periksa pada halaman 24 yaitu berkenaan dengan kelompok tani hutan dan peningkatan kapasitas penyuluh serta berkenaan dengan pengentasan kemiskinan juga tentang tanah objek tentang TORA dan perhutanan sosial pada halaman 25 yang secara keseluruhan targetnya 12,7 juta. Jadi secara keseluruhan tuh hutan sosial bisa kita alokasikan 12,7 sudah di *reserved* posisinya, lokasinya. Tetapi untuk direalisasikan dan di distribusikan atau disebarakan kepada rakyat itu mungkin dalam 5 tahun itu bisa yang lalu kita targetkan 4 juta hektar sampai 2019

sekarang realisasinya nanti kami laporkan kira-kira 3,4 juta hektar tetapi disitu juga termasuk ada hutan adat, masyarakat hukum adat yang memang membutuhkan dukungan untuk memperoleh hak-haknya berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat.

Selanjutnya berkenaan dengan bagaimana peningkatan kualitas lingkungan hidup tadi yang kami laporkan mohon periksa pada *screen* 28. Kita sebetulnya selama ini sudah mencoba melakukan pemantauan kualitas udara.

Bapak Ibu dan Anggota yang kami hormati dan Pimpinan

Kalau kita lihat isu publiknya kan cukup kencang juga soal misalnya kualitas udara kota Jakarta dan sebagainya. Dalam hal ini maka Pemerintah sebetulnya adu kuat di pendataan dan sistematika mengumpulkan data. Oleh karena itu apakah itu untuk analisis kualitas udara atukah kualitas air itu termasuk pemantauannya secara terus menerus itu menjadi sangat penting. Jadi, sungai dan udara saya kira kurang lebih seperti itu.

Kemudian tentang kebakaran hutan dan lahan juga masih menjadi prioritas dan mohon periksa pada halaman 29. Nanti kami akan melaporkan sesuai dengan tadi pertanyaan yang terhormat Pak Ketua. Kemudian untuk pencegahan pencemaran ini juga ada langkah-langkah pembinaan kepada forum masyarakat dan juga kepada dunia usaha yaitu melalui penerapan efektivitas pemanfaatan air, efektivitas pemanfaatan energi, dan lain-lain, itu yang dinilai setiap saat.

Kemudian juga pada halaman 31 misalnya berkaitan dengan penanganan masalah-masalah di kawasan konservasi. Ini angka-angkanya ada semua disitu Pimpinan dan saya kira sudah ada dokumennya juga untuk keanekaragaman hayati. Selanjutnya berkenaan dengan masih dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yaitu bagaimana penanganan pencemaran di halaman 33 yaitu dengan mengatasi pencemaran tumpahan minyak saya kira selama 1 tahun ini kita sudah mengalami 2 atau 3 kali kasus pencemaran minyak di laut atau di sungai. Itu secara responsif memang kami menugaskan Pak Dirjen kalau begitu ada kejadian itu juga harus langsung ke lapangan sehingga tidak boleh terjadi *dispute* antara masyarakat kemudian swasta yang punya masalah dan LSM. Jadi, supaya tidak *dispute* jadi harus duluan datanya seperti apa kondisi lapangannya seperti apa.

Saya juga berterima kasih Anggota Dewan dari daerah atau Dapil biasanya sensitif tentang hal itu dan saya dikontak minta perhatian. Jadi saya kira ritme ini sudah bisa sejalan. Kemudian kita juga di halaman 34 memberikan kekhususan penanganan untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Sudah ada Undang-Undang yang dibantu oleh DPR pada saat itu

Komisi VII untuk bagaimana kita menangani merkuri di Indonesia. Ini memang kondisinya cukup berat di beberapa wilayah termasuk di Maluku, di NTB, kemudian di Jawa Barat juga ada, di Banten juga ada, di beberapa tempat.

Kemudian restorasi dan pemulihan lahan gambut saya kira yang di BRG ada penanganannya. Di kami juga terus mengikuti karena dananya BRG itu melekat ke Kementerian LHK jadi ada target-targetnya secara kuantitatif di sini. Mohon berkenan untuk periksa pada halaman 35. Jadi, dalam kaitan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua ada ancaman-ancaman terhadap tumbuhan ataupun satwa liar ini juga menjadi atensi dan menjadi program seperti di KSDAE maupun di Gakkum. Jadi sudah ada langkah-langkah di Penegakkan Hukum juga untuk ini dan cukup banyak terutama yang menonjol adalah penanganan jual beli satwa melalui media sosial itu secara langsung segera ditangani oleh Gakkum. Tentu disamping *illegal logging*, dan lain-lain.

Dalam kelembagaan tentu selama 5 tahun kemarin dan kedepan kami memperkirakan bahwa usaha-usaha untuk penataan regulasi masih akan terus dilakukan yang prinsipnya adalah tetap ramah lingkungan tetapi mempermudah usaha. Apakah usaha untuk dunia usaha apalagi untuk usaha kecil bagi masyarakat. Jadi, arahnya seperti itu.

Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Juga tentang saya ini juga saya kira untuk Komisi IV menjadi hal yang baru yaitu tentang, baru dalam arti untuk pendalamannya walaupun selama ini walaupun di dua Komisi kami tetap melaporkan utuh apakah di Komisi IV ataukah di Komisi VII tapi tentu pendalamannya yang berbeda. Di halaman 39 yaitu berkenaan dengan peningkatan ketahanan iklim. Jadi perubahan iklim kita kalau hari ini kita dengar berita bahwa Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan perubahan iklim internasional. Kalau Indonesia sebetulnya di Undang-Undang Dasar kita itu ditegaskan di Pasal 28 H. Jadi Indonesia mengatasi lingkungannya sendiri kemudian melaksanakan implementasi *Paris Agreement* perubahan iklim itu sebetulnya lebih banyak karena mandat dan perintah Undang-Undang Dasar. Jadi kita gak tergantung di tekan siapa, perintah siapa. Jadi berbagai instrumen-instrumen nasional itu kita jadikan referensi untuk sistematika kerja.

Di pengendalian perubahan iklim ini deprogram ini kita akan mendorong selama 5 tahun kedepan yaitu rehabilitasi hutan *mangrove*, kemudian pengembangan kampung-kampung yang menerapkan ramah lingkungan jadi kita sebutnya program kampung iklim. Mohon periksa pada halaman 39. Demikian pula dengan pembangunan rendah karbon.

Bapak Ibu yang kami hormati

Mungkin untuk perubahan iklim dan karbon ini memang perlu menjadi atensi. Kami sedang memformulasikan rumusan akhirnya untuk regulasi dan

perlu nanti kami konsultasikan dulu kepada yang terhormat Pimpinan dan Kapoksi mungkin atau mungkin juga di Komisi IV secara keseluruhan karena dia akan berkaitan dengan *carbon pricing*. Jadi kita, kita punya usaha untuk menurunkan emisi karbon yang kemudian itu harus menjadi *reward* gitu. Jadi orang yang menurunkan karbon harus diberi penghargaan yang disebut *carbon pricing*. Ada yang konsep skemanya adalah *carbon pricing* dalam negeri untuk memenuhi mandat komitmen kepada internasional untuk 29-41% emisi dan selebihnya bisa untuk perdagangan karbon internasional. Selama ini sudah berlangsung beberapa perusahaan karena proses ini sudah berjalan sejak tahun 2011-an 2013-an. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan juga yang melakukan *carbon trading* dengan perusahaan internasional tetapi nanti dengan pengaturan yang kami rencanakan akan selesai di bulan November-Desember ini, itu dikoridor saja dengan aturan kita tetapi yang sudah berjalan itu tidak bisa kita hentikan karena kan kepastian bisnis juga tidak boleh terganggu. Jadi tentang karbon dan perubahan iklim ini Pak Ketua, Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat saya mohon nanti ada pendalaman khusus apakah FGD misalnya supaya bisa lebih apa namanya, lebih intens.

Selanjutnya juga terkait dengan kawasan perlindungan ataupun nanti perencanaan penanganannya, kelembagaannya dan sebagainya. Selanjutnya mohon periksa pada halaman 42 berkaitan dengan pengelolaan limbah. Jadi, pengelolaan limbah ini terkait dengan sampah rumah tangga. Kita memang harus melakukan penurunan itu sudah ada regulasi-regulasinya apakah Jakstra ataukah Instruksi Presiden secara khusus untuk penanganan sampah plastik, itu sudah ada. Jadi kita akan melakukan pengendalian pencemaran air dari sampah kemudian penanganan sampah, kemudian pengawasan *effluent*. Jadi, apa namanya buangan ke sungai ke air yaitu melalui instalansi pengelolaan air limbah. Ini juga apa, memerlukan pendalaman. Dan seperti yang kami sampaikan tadi memerlukan dukungan yang luar biasa. Sekarang mungkin kalau di jumlah-jumlah dananya belum sampai 1,5 triliun. Belum sampai Ketua. Jadi, dari 9 koma sekian mungkin 1,2 sampai 1,5 triliun di lingkungan dan padahal kondisi lingkungannya sudah cukup gawat sehingga memang nanti kita perlu ada terobosannya dan mungkin diperlukan dulu diskusi-diskusi pendalaman secara teknis.

Kemudian *mangrove* juga seperti kami laporkan di halaman 43. Itu kurang lebih hal-hal berkaitan dalam waktu 5 tahun kedepan dan izinkan kami menyampaikan bagaimana arahan dalam rencana kerja Pemerintah atau RKP 2020.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati

Setelah pelantikan Presiden periode 2019-2024 Bapak Presiden dan Wakil Presiden menegaskan visi yaitu di halaman 48 untuk terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Jadi dari 9 misi ini ada yang secara khusus disebutkan di misi yang ke-4 yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, dalam uraiannya apa saja apa *benchmark* utamanya yaitu pada halaman 49, melanjutkan *one map policy* jadi sebetulnya harmonisasi keperluan sektor atas sumber daya alam atau tata ruang pengendalian, pengawasan, pelaksanaannya, pencegahan kebakaran hutan, penanam kembali lahan kritis, EBT (Energi Baru Terbarukan), konservasi gambut, penurunan emisi karbon, kemudian masyarakat adat, lalu hutan kota dan ruang terbuka hijau serta rehabilitasi hutan dan lahan, gakkum, dan percepatan pemulihan.

Jadi, sudah ada arahan dari Bapak Presiden mohon periksa pada halaman 50. Arah Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 mohon periksa pada halaman 51 yang intinya adalah memperkuat ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, peningkatkan kualitas lingkungan, membangun infrastruktur lingkungan untuk pengentasan kemiskinan seperti pengembangan ekowisata kemudian SDM dengan pendidikan vokasi. Konfigurasinya secara menyeluruh, secara integrasi pada halaman 52 mohon periksa di Program Prioritas Nasional pertama, kemudian ketiga dan keempat itu KLHK mempunyai mandat. Secara keseluruhan kalau di proyeksikan ke anggaran mandat ini kira-kira 57%. 55% rata-rata setiap tahun antara 52-55 sampai 60-an persen anggaran kita itu adalah mandat Prioritas Nasional jadi memang ada beban tugas yang dibawa dan kalau kita lihat misalnya pada kegiatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di halaman 53 dia berkenaan dengan reforma agraria dan hutan sosial, tadi sudah kami laporkan dengan rincian kegiatannya pada halaman berikut di 54 yaitu penataan pemilikan, pra kondisi masyarakatnya kemudian pengelolaan secara kolaboratif dengan dukungan para pihak, pengembangan usaha dan sebagainya.

Sedangkan pada Prioritas Nasional ke-3 kita mohon periksa pada halaman 55 yaitu berkenaan dengan peningkatan industri berbasis hulu hilir kemudian daya saing destinasi wisata alam dengan didukung oleh rantai pasok kemudian penyelenggaraan vokasi dan kita lihat juga berkenaan dengan nilai tambah tadi sudah kami laporkan dan terkait dengan ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup pada halaman 57 ini di Program Prioritas yang kedua yaitu penataan kawasan hutan, pemeliharaan, dan pemulihan konservasi. Kemudian Program Citarum, ini masih lanjut dan mohon periksa pada Program Prioritas 4 itu seluruhnya terkait dengan KLHK. Pencegahan

pencemaran, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, pemulihan dan penguatan kelembagaan. Jadi pada bagian ini sebetulnya yang kita bisa dongkrak untuk mengatasi hal-hal yang secara nyata terjadi saat ini. Rinciannya mohon periksa pada halaman 58. Misalnya pada penataan kawasan hutan, pemeliharaan konservasi, dan izinkan saya yang Citarum Harum yaitu ada Instruksi Presidennya, ada Peraturan Presidennya dipimpin oleh Kemenko Maritim.

Saya juga mohon izin melaporkan bahwa pada kabinet ini KLHK dibawah koordinasi Menko Perekonomian tapi sekarang kita dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Jadi digeser. Tapi pada dasarnya sih dalam pelaksanaannya Kementerian LHK ya kesana kesini. Di Pak Wiranto kebakaran hutan, di Kemekopolhukam kebakaran hutan, di Kemenko Ekuin semua hal terkait industri, produksi, syarat, lain-lain lingkungan. Kemudian di Kemenko Maritim ya terkait dengan investasi dan sebagainya. Jadi, Kementerian ini memang Kementerian yang menopang dari berbagai kegiatan.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati

Saya mohon izin untuk mohon periksa pada halaman 60. Inilah kegiatan-kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional yang mencakup 4,9 triliun dana LHK dari pagu 9,3 begitu atau 9 triliun karena yang 300 lebih itu adalah dananya BRG. Jadi mohon izin kami menyampaikan pagu Kementerian LHK pada tahun 2020 pada halaman 62 yaitu untuk 13 program. Ada manajemen, ada pengawasan, ada pengelolaan hutan produksi lestari, ada pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, program konservasi sumber daya alam dan ekosistem, planologi dan tata lingkungan, litbang, kemudian penyuluhan, hutan sosial, dan kemitraan lingkungan, penegakkan hukum, dan pengendalian perubahan iklim serta sampah, limbah dan B3 dan pencemaran dan pemulih lingkungan dengan dana Rp 9.006.330.291.000 dan secara khusus BRG senilai Rp 312.995.525.000 dan total menjadi Rp 9.319.325.816.000. Jadi, untuk bagaimana belanjanya? Belanja pegawainya 2 triliun, belanja-belanja kegiatan non-operasional nya sampai 6,517.

Pimpinan sebagai bagian akhir dari domain laporan, izinkan kami menyampaikan posisi per 4 November, realisasi masih 62,78% dan ini kita menunggu beberapa realisasi karena dana yang besar seperti dana rehabilitasi hutan dan lahan sangat besar itu belum bisa dinilai uangnya karena realisasinya nunggu hujan turun. Jadi, sekarang sudah mulai musim hujan nanti begitu hujan turun tuh penanamannya akan besar-besaran dimana-mana dan dalam kaitan ini kami memikirkan dan merancang untuk penanaman pohon ini juga bisa melibatkan yang terhormat Anggota di tempat atau di wilayah yang terdekat atau di wilayah dapilnya.

Bapak Pimpinan itu kurang lebih dokumennya. Selanjutnya berkenaan dengan tadi pokok-pokok persoalan yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua. Saya ingin menyampaikan *overview* saja, nanti dokumen lengkapnya sebetulnya ada disini segini tebalnya tapi ini juga kami antisipasi dan kelihatannya masih kurang dari tadi yang ditanyakan jadi kita akan tambahkan lagi dan secara tertulis akan kami susulkan. Secara umum kira-kira berkenaan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu izinkan kami melaporkan bahwa memang tahun 2019 ini kondisinya lebih panas jadi jumlah *hot spot* itu kira-kira 207% lebih tinggi dari tahun lalu. Kemudian sebagai contoh, upaya terus dilakukan oleh Pemerintah dengan *waterbombing*, pemadaman darat, dan sebagainya. Sebagai indikator saja, *waterbombing* untuk air yang dijatuhkan itu sekarang sudah 403 juta liter. 403 juta liter air di *waterbombing* perbandingannya dengan tahun lalu kira-kira tahun lalu 315 juta. Jadi, sekarang memang kencang banget udaranya dan sebagainya. Kemarin kekuatan kita untuk mengatasi juga dengan mengintensifkan modifikasi cuaca, jadi hujan buatan. Jadi secara umum Pimpinan, nah areal yang terbakar sekarang ini kira-kira 857 ribu hektar dibandingkan dengan tahun lalu 510 ribu hektar yang terbakar. Yang sudah kebakaran. Jadi bisa dibakar, bisa kebakaran, terbakar. Jadi, yang kebakaran itu sekian. Tentu sedang dialami, sekarang sudah dilakukan segel terhadap 79 perusahaan. Kira-kira dari 79 itu 50-an lebih kebun kemudian berapa belas begitu, hutan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Begitu Bu Menteri, mohon maaf.

Kalau kita nggak berani jujur kita susah mengobatinya. Harusnya kita apa adanya, ini dibakar ini pembakarnya, ini, ini. Bukan hanya alam. Berapa yang dibakar, berapa yang terpapar kebakarannya itu, jelas kita tuh. Kalau kita terus putar begini nggak ada kira gambarannya. Sehebat apapun dan sebesar apapun uang negara tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Contoh sederhana, efektif dengan hujan yang dibuat tuhan atautkah dalam cara kira membuat air hujan? Oh uang negara berapa puluh miliar tuh keluar. Hujan saja sekali, beres.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kang Haerudin, biar Ibu Menteri menyelesaikan dulu. Kalau masalah terbakar atau dibakar nanti kan kita meninjau ke lapangan besok, ya? Lanjutkan dulu karena tinggal sedikit lagi.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya kan ada proses hukum juga.

Ya Ketua, terima kasih.

Saya tadi ingin mengusulkan seperti itu karena kan akan ada pendalaman dan Bapak Ibu yang terhormat akan pergi ke beberapa lokasi. Saya kira Kementerian ini sudah berusaha untuk sejujur mungkin tetapi memang tidak mudah. Ada proses hukum dan sebagainya, tidak ada yang kita sembunyikan. Tetapi memang tidak mudah seperti membalik telapak tangan bahwa ini selesai, begitu. Memang ada strategi-strategi ya selama 5 tahun kemarin itu sebetulnya banyak strategi barunya seperti pencegahan patroli terpadu dengan menetapkan siaga darurat. Kalau di waktu yang lalu sebelum 5 tahun yang lalu jadi sebelumnya nggak ada siaga darurat, adanya darurat jadi sudah kebakaran habis dulu. Makanya pernah terjadi kebakaran hutan di tahun 2006 sebetulnya sampai hampir 4 juta hektar. Dan sebelumnya lagi di tahun 97-98 itu sampai 11 juta hektar. Makanya di 5 tahun yang lalu kita mencoba memperbaiki dulu. Jadi memang *learning by doing* banget ini. Jadi kita belajar, belajar, belajar. Jadi arahnya Bapak Presiden sebagai strategi adalah prioritas pencegahan, deteksi dini, monitoring. Di dalam monitoring ini juga banyak sistem yang ditingkatkan. Dari Lembaga Antariksa Nasional, dari BMKG, itu semua menyatu.

Kemudian yang kedua, strateginya penataan pengelolaan ekosistem gambut. Nah disini kejujuran seperti Pak..yang terhormat Pak Haerudin katakan memang mahal banget. Kita ketika mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban swasta kita diajukan juga ke pengadilan dan kita hadapi begitu. Saya kira Pak Panggah mengalami ya Pak ya? Saya banyak minta tolong juga ke beberapa Kementerian. Jadi usahanya sudah dilakukan. kemudian pemadaman terhadap titik api yang muncul, penegakkan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dalam kaitan dengan rencana kerja yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota ke lapangan. Saya kira beberapa hal memang masih harus kita *improve* terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat yaitu berkenaan dengan pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi, nanti

masih akan dijumpai hal-hal berkenaan dengan hal tersebut. Nanti mungkin akan dikaitkan dengan ada satu pasal di Undang-Undang 32 soal boleh membakar sebanyak 2 hektar. Jadi ada kompleksitas itu. Itu juga bagian yang penting yang menurut saya di tahun depan itu sudah harus *firm* sudah harus jelas bagaimana kita menyelesaikannya karena tinggal bagian yang pertama itu. Tentu saja hujan yang paling efektif adalah hujan secara alam tetapi dalam hal menghapus asap, asap yang gak bisa bergerak kadang-kadang dia terkepung oleh kecepatan angin itu hujan buatan itu gunanya juga disitu. Jadi menghilangkan asapnya dan sebagainya. Oleh karena itu, ke depan juga mungkin harus ada rekayasa mengikuti dimana awan terus dimana harus bisa hujan. Jadi, memang beberapa hal kelihatannya harus di *improve* sedikit demi sedikit. Tentu saja penegakkan hukum harus lebih intensif lagi. Nanti yang tertulis nanti saya kira sebelum ke lapangan kami kirimkan Bapak Pimpinan.

Kemudian berkenaan dengan Tanah Objek Reforma Agraria tadi sudah kami laporkan prinsip-prinsipnya tetapi kira-kira progresnya pada saat ini yang sudah selesai. Yang direncanakan sebetulnya untuk tanah yang bisa diberikan kepada masyarakat bisa dilepaskan dari hutan itu kira-kira 4,1 yang ditargetkan tapi sudah kita evaluasi sebetulnya bisa 4,9 juta hektar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Menteri, pertanyaan saya dari 4 koma sekian juta itu, itu hutan apa yang akan di TORA kan? Karena kita harus tahu. Karena terjadi juga pengaduan masyarakat tumpang tindih perihal tanah adat. Jangan sampai terjadi tanah adat dilanggar.

Terima kasih

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Pak.

Iya betul sekali Pak jadi memang yang dilepaskan ini adalah hutan produksi yang dapat dikonversi dan di dalam verifikasinya sangat ketat jadi ada tim inventarisasi, ada tim verifikasinya. Oleh karena itu memang jadi seperti kelihatannya tidak cepat melepaskan itu tapi sudah, sudah berlansung. Sekarang sudah dilakukan inventarisasi terhadap kira-kira 980 ribu-an hektar. Jadi itu sudah dipilih-pilih sudah di *inventory*. Saya kira nanti juga kami akan laporkan secara tertulis dan lengkap Bapak.

Kemudian hutan sosial juga demikian saya ingin melaporkan saja realisasinya. Dari 12,7 juta hektar itu yang sudah di realisir di serahkan kepada 6.081 kelompok degan luas 3,421 ribu hektar. Dan ini merangkum sebanyak

763.853 kepala keluarga. Dia bisa pakai hutan ini untuk 35 tahun dan boleh diperpanjang 35 tahun lagi. Beberapa hasil studi dampaknya dan sebagainya saya kira Tuban dan Lumajang termasuk contoh yang berhasil juga Kalimantan Barat di Kubu Raya. Kemudian di Kalimantan Selatan juga ada. Dalam kaitan ini untuk hutan sosial memang akhirnya saya juga mohon dukungan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Termasuk juga tadi yang kebakaran hutan dan lahan itu dukungan dari Menteri Pertaniannya musti kencang karena habis dapat lahannya kan masyarakatnya harus bertani, dia harus diberi kesempatan untuk berusaha dan mendapatkan fasilitas pelayanan publik. Jadi nggak di Kehutanan bukan nggak sampai sana jangkauannya. Jadi koordinasi dengan Kementan itu perlu sangat intens dan mungkin termasuk mohon izin yang terhormat Pimpinan dan Anggota bisa juga membantu untuk kontrol interaksinya. Saya sih sudah berbicara dengan Pak Syahrul Yasin Limpo satu partai kebetulan, dan saya minta tolong dibantu untuk 2 hal ini. Tapi saya kira akan efektif dan jauh lebih cepat nanti secara nyata ketika kami mendapatkan apa namanya pengawasan dan dukungan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota.

Selanjutnya terkait dengan Gakkum. Mohon izin kami melaporkan bahwa sejak 2015 sampai 2019 sudah dilakukan 459 operasi terhadap perambahan kawasan hutan dan ini mencakup area kira-kira 18,7 juta hektar. Jadi memang pilihannya tidak ada lain kecuali pengawasan dan kontrol dengan cara apakah patroli, penegakkan hukum, dan lain-lain. Tapi memang saya kira untuk memperbaiki atau bagian dari pemulihan itu adalah penegakkan hukum.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Selanjutnya berkenaan dengan sawit, itu sudah ada Instruksi Presiden pada bulan September tahun lalu dan ada penugasan kepada Kementerian LHK yaitu menyangkut menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan untuk permohonan baru atau yang tidak melengkapi syarat dan lain-lain tetapi ada yang sudah berjalan sudah diatur sebetulnya sejak tahun 2015 dan sebelumnya dalam koordinasi dan konsultasi bersama KPK yaitu ada keterlanjuran yang bisa diproses tapi ada yang tidak bisa diproses. Itu datanya angka-angkanya lengkap Pimpinan, nanti kami laporkan saja secara tertulis. Saya kira Direktorat Jenderal Planologi sudah banyak menyelesaikan.

Saya mohon izin 2 hal yang belum bisa dirumuskan formulasi kebijakannya, nanti juga kami akan komunikasikan ini karena menyangkut beberapa Kementerian. Apakah ATR, terutama Kementerian Pertanian yaitu berkenaan dengan 20% kewajiban plasma. Di Undang-Undang Perkebunan itu kewajiban plasmanya bisa tersebar sedangkan yang di kehutanan diharapkan di dalam satu ekosistem. Jadi, disini ada *dispute* regulasi Bapak. Jadi, kita memang masih harus intensif. Untuk ini memang koordinasi untuk

penyelesaiannya di Menko Perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 3 koma ini ada 3,177 sawit di dalam kawasan hutan itu yang masih yang sedang proses permohonan pelepasan artinya berdasarkan kriteria dan aturan itu bisa diselesaikan 576. Yang belum ada proses permohonan 2,5 dan ini harus diidentifikasi seperti apa, ini juga sudah kami laporkan ke Pak Menko dan akan kita selesaikan yaitu, nah ini lagi. Formulasinya sedang dikonsultasikan secara hukum. Saya juga sudah konsul ke KPK menanyakan. Karena pada dasarnya mungkin tidak arif juga kalau kita sedikit-sedikit pidana, dikit-dikit pidana tetapi memang harus dicarikan jalan. Ini sebetulnya permasalahannya apa karena sanksi itu kan bisa administrative, bisa perdata, bisa pidana. Jadi kalau dikit-dikit pidana itu juga tidak arif juga. Jadi memang ini sedang di formulasi. Jadi memang 2 hal itu yang sekarang berkaitan dengan Inpres sawit yang sedang kita selesaikan. Kemudian terkakhir berkenaan dengan tata ruang.

Yang terhormat Pimpinan

Di waktu yang lalu sejak 2008 sampai 2019 yaitu sudah dilakukan proses-proses penyelesaian yang masih ada di DPR sekarang yaitu Sulawesi Tenggara sudah selesai 2015, Bangka Belitung juga sudah selesai 2015. Yang masih belum selesai sebagian, sebentar-sebentar izin Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Menteri setahu saya Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung itu belum lho, belum ada SK nya di DPR karena yang Sulawesi itu kami indikasikan. Karena waktu itu saya yang ke sana itu bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan pengusaha. Termasuk yang di Babel juga. Contoh, di Belitung ada pengusaha Malaysia membuka tambang di kawasan hutan lindung maka itu yang menjadi ganjalannya. Komitmen kami, Komisi IV apabila untuk kepentingan rakyat segera kami setuju tapi kalau di dompleng kepentingan pengusaha tolong di *enclave* setahu saya yang masih menggantung itu 7 Provinsi.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

8 ya

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

8 ya?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

8 Ketua. Saya mohon maaf kami koreksi. Jadi memang yang belum selesai perubahan peruntukan DPCLS masih menunggu persetujuan DPR RI yaitu seluas 216.633 hektar di 8 provinsi yaitu di Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau, Papua Barat, dan NTT.

Saya kira itu Pimpinan yang kami hormati dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Om santi santi santi om.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Bu Menteri.

Yang menjadi catatan terpenting adalah sampai hari ini serapan anggaran masih 62%. Waktunya hanya tinggal 39 hari lagi. Jadi nanti kalau ada penanaman pohon, reboisasi, seperti janji Bu Menteri tadi mohon anggota Komisi IV disertakan. Karena mereka punya kebanggaan tersendiri bisa menghidupkan kampung halamannya atau Daerah Pemilihannya. Selanjutnya tadi ada yang belum berkenalan silakan Pak Krisantus Kurniawan.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua Komisi IV, Para Pimpinan Komisi IV dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi IV yang saya hormati

Ibu Menteri LHK beserta para Sekretaris Jenderal dan Dirjen yang saya hormati.

Mohon maaf saya datang terlambat. *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*. Nah ini Pak Wamen nih pandai kayanya. Harus harus harus! Saya Krisantus Kurniawan dari Fraksi PDI Perjuangan, Nomor Anggota A 243 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II meliputi Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Sintang, dan Kapuas Hulu.

Terima kasih Pak Ketua. Demikian perkenalan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka!

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya sebelah kiri Pak Adi

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, Dapil Provinsi Bali, Partai Golongan Karya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terakhir ini selalu mengatakan saya kaum millennial. Silakan Slamet Ariyadi

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan bahwasannya kami sebagai perwakilan dari millennial.

Perkenalkan Ibu Menteri, saya Slamet Ariyadi dari Partai Amanat Nasional, Nomor Anggota A 508, Dapil Jatim XI Madura.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Jadi, teman-teman Anggota Komisi IV disini ada 29 penanya. Kalau 1 penanya 5 menit saya rasa sampai sore tidak selesai. Jadi kita batasi 1 penanya 5 menit dimulai dari yang terhormat Pimpinan Komisi IV Pak Dedi, *mangga* silakan

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, boleh interupsi kan?

Memang kita biasanya kritik tidak menghalangi tapi biasanya Pimpinan itu adalah manajemen di dalam rapat. Boleh berpendapat seperti kita. Jadi mohon maaf memang harus pindah duduknya. Jadi saya ingin sampaikan

bahwa ini kolektif kolegial Pimpinan. Jadi butuh kami sampaikan bahwa Pimpinan bertanya kepada seluruh Anggota dipersilakan, setiap Anggota berpendapat, dirangkum, biar kita jaga keputusan kita bersama.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Haerudin atas koreksinya. Nanti setelah ini Pak Dedi kalau Bapak mau bertanya harus pindah duduk tidak boleh didepan. Nanti Pak Haerudin nanya, beliau boleh duduk di sini. Terima kasih. Jadi Pak Dedi mohon maaf, Pak Panggah pindah kesana jadi anggota dulu sementara.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik,

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Sampurasun.

Pak Ketua yang saya hormati serta Pimpinan Pak Haerudin yang saya hormati.

Bu Menteri dan para Dirjennya.

Yang pertama bahwa sebenarnya kalau hari ini orang rajin ngomongin terorisme, radikalisme, ancaman terbesar di Indonesia itu menurut saya adalah lingkungan hidup. Karena kalau sudah lingkungannya hancur maka tak ada lagi kehidupan. *Problem* lingkungan itu ada 2 menurut saya. Pertama adalah digusurnya kerangka pemahaman tradisionalisme yang melekat dalam sistem hidup di masyarakatnya yang membangun sistem nilai pada lingkungannya. Kelompok-kelompok penghayat di Indonesia secara umum keyakinannya itu sangat melekat pada kepercayaan pada leluhurnya yang ada pada lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga spirit untuk merawat lingkungan adalah titah yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian itu tergusur dan mereka terpinggirkan setelah terpinggirkanpun mereka digusur juga oleh berbagai kepentingan ekonomi.

Nah kemudian kita masuk ke fase menjadi masyarakat modern. Fase masyarakat modern itu ada 2 hal. Yang pertama adalah mengedepankan nilai-nilai intelektualitas kemudian yang kedua adalah mengedepankan Undang-Undang sebagai *basic* penegakkan. Nah intelektualitas kita mentok karena pendidikan yang dikembangkan di kita nyaris tidak memiliki *basic* pembentuk karakter manusia. Saya berikan contoh misalnya dimana

problem sampah terbesar? Pasti di daerah yang pendidikannya tinggi di pusat-pusat kota. Kemudian anak-anak sekolah kita lulus sampai pendidikan tinggi cara buang sampah pun sampai hari ini banyak yang belum disiplin. Artinya bahwa sistem pendidikan kita tidak mengikatkan diri pada lingkungan. Teori lebih banyak dibanding aplikasi.

Kemudian yang berikutnya adalah penegakkan. Penegakkan hukum di bidang lingkungan kurang mendapat perhatian beda dengan korupsi dan terorisme. Nah pada aspek penegakkan ini kita dihadapkan pada selalu 2 *problem*. Pertama adalah kepentingan ekonomi masyarakat, yang kedua adalah kepentingan dunia usaha. Sebuah industri yang mencemari lingkungan yang besar begitu dihadapkan bahwa besok kalau ditutup PHK masalah maka lingkungan dikesampingkan. Nah *problem* ini yang secara terus menerus akan merusak sistem berfikir lingkungan kita. Kemudian persoalan gunung, sawah, dan laut semuanya kan sudah tercemar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dedi, Pak Dedi mengingatkan sudah hampir 2 menit. Kita harus adil.

WAKIL KETUA/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, 1 lagi saja. Saya komitmennya satu saja lah, kita gerakkan penanam pohon dalam setiap tahun dari mulai 1 juta pohon sampai 1 miliar pohon. Tumbuhnya belum tentu, tapi menebang pohon setiap hari. Menurut saya pilih saja salah satu, kita ini mau nanam pohon yang belum tentu jadi atau mempertahankan pohon yang ada tidak ditebang. Itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Sampurasun

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Sekarang yang dari ujung dulu, ujung pulau Sumatera, silakan Pak Salim Fakhry.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua yang bijaksana dan sangat tegas dalam memimpin rapat.

Bu Menteri yang kami hormati.

Saya langsung saja. Saya sekedar mengingatkan saja Bapak Pimpinan yang meneruskan apa yang dikatakan Saudara Ichsan masalah lingkungan hidup. Informasi Bu Menteri, sebenarnya kalau dibuka hati Ibu Menteri Ibu lebih mau di IV. Sebab kita sudah bersama-sama 5 tahun Bu. Karena di VII mohon maaf Ibu sangat mungkin agak kejam itu Pak Ketua orang VII, orang IV ini baik. Jadi, hanya informasi Pak Ketua kalau Komisi VII tidak diakui lingkungan hidup disitu mereka tidak mengadakan rapat selama 5 tahun. Ini informasi saja. Makanya sudah diputuskan dalam Pengganti Bamus, kita bertahan Ketua. Sebab Bu Menteri ini dan jajaran lebih senang kemari, pertama.

Yang kedua Ibu Menteri, Pak Ketua kita ada kunspik, ini masalah kebakaran. Saran saya Pak Ketua, kita data siapa yang tukang bakar, pengusaha tukang bakar tuh panggil ke Komisi IV Ketua, saran. Selanjutnya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tolong Sekretariat dicatat ya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Yang Kalteng Ketua, saya sekedar mengingatkan lagi, saya takut Ketua lupa. Kalteng pun tolong diingatkan dipanggil lagi Ketua. Sebab Pak Gubernur yang terhormat, sahabat kita ini 2 kali dipanggil tidak pernah mau menghadiri. Selanjutnya Ibu Menteri, baru-baru ini ada masalah ini Aceh Ibu, ada masalah Jambor Lateng perhutani masyarakat. Ada rapat sebulan yang lalu Bu Menteri. Pak Kapolres dipanggil rapat di Venezuela cuma sangat sedih saya Bu Menteri, karena saya putra sana, kampung saya, saya tidak dilibatkan. Apa salahnya? Seolah-olah Pak Ketua kalau saya dilibatkan rapat itu bisa batal. Sama bilang Pak Ketua tadi, Pak Dedi bilang kalau tanam ini, kita kan untuk menjaga Pak Ketua. Janji Bu Menteri dulu selalu akan dilibatkan di Daerah Pemilihannya. Saya melihat di Venezuela itu Bu Menteri, padahal yang lebih mengetahui daerah tersebut adalah dari Dapilnya, Pak Ketua. Gak sampai ke Menteri pun persoalan Jambur Lateng pasti bisa saya selesaikan Bu Menteri.

Selanjutnya Bu Menteri, yang terakhir Pak Ketua sebelum Ketua peringatkan. Surat Bupati Gayo Lues sudah masuk Bu Menteri, ada kunjungan di minta mungkin Pak Wiratno yang kesana Bu Menteri. Pemerintah Gayo Lues

sudah bersiap karena kemitraan antara Pemda Gayo Lues Provinsi Aceh dan Kementerian Lingkungan Hidup sudah disiapkan Pemerintah Daerah. Harapan kami Bu Menteri, agar Pak Wiratno Dirjen yang bersangkutan dapat hadir sesuai jadwal Ibu Menteri. Dan saya kalau diajak Pak Wiratno berangkat, ikut. Kalau tidak pun saya akan pasti pergi sebab Pak Ketua, kalau Bapak yang mengajak ah kan sudah paham Ketua. Kalau kita sendiri pergi, paham juga Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi maksudnya pahamnya gini, kalau pergi dengan saya, saya yang bayar ongkosnya. Kalau beliau pergi sendiri saya juga yang bayar ongkosnya. Selanjutnya Pak Andi Akmal silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Baik Ketua terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Yang pertama Bu Menteri, kemarin saya ada tulisan di media, ada 2 catatan untuk Menteri LHK yang baru sebagai bukti perhatian dan cinta kepada Bu Menteri dan juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama mengingatkan bahwa selama 5 tahun kemarin Bu Menteri kita tidak ada Undang-Undang yang kita hasilkan. Sebenarnya kita ingin revisi Undang-Undang tentang KSDAE. Karena sudah 30 tahun itu tidak ada revisinya dan kita menganggap revisi itu penting karena sebagai benteng konservasi daripada apa namanya hutan kita.

Dan yang kedua ada 300 ribu orang telah menandatangani petisi ya di laman change.org yang mendesak agar ini bisa dilanjutkan pembahasannya untuk Undang-Undang. Karena itu Pak Ketua mungkin perlu kita pikirkan kedepannya agar pembahasan Undang-Undang ini bisa kita lanjutkan gitu. Itu yang pertama.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Maksudnya revisi Undang-Undang?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Revisi Undang-Undang KSDAE Ketua yang kemarin pernah kita bahas di tengah jalan terhenti karena dari Kementerianya tidak mau melanjutkan. Nah ini kan perlu ada penjelasan. Siapa yang keberatan sebenarnya gitu dan kenapa harus keberatan? Yang kedua, penanggulangan karhutla Bu Menteri, kita menghargai upaya dari Kementerian Kehutanan dan juga seluruh instansi yang lainnya. Cuma kami Komisi IV ingin supaya LHK itu sebagai *leading sector* Bu. Artinya selama ini kan kita dengar BNPB, Polisi, TNI, nggak ada salah tapi kita ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya konsep dari apa LHK tentang penanggulangan kebakaran hutan gitu. Ya kan karena namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, di sini juga ada lahan gambut ya BRG yang paling banyak kebakar sebenarnya perlu disampaikan ke publik bahwa kebakaran ini terjadi diluar hutan atau di kawasan hutan? Ah kalau di kawasan hutan tanggungjawab nya Kementerian LHK.

Jadi mungkin Bu Menteri perlu penjelasan *detail* kepada publik, masyarakat bagaimana peran daripada Kementerian LHK untuk penanggulan karhutla. Saya tidak basa ini karena sudah dijelaskan. Karena dari data *monitoring* sistem ya, atau siporsinya LHK bahwa dari 2014 sampai 2019 ada 3 juta hektar lahan yang terbakar. Kalau kerugiannya saya kira pasti ratusan triliun ya. Oleh karena itu saya kira perlu untuk apa namanya nanti langkah-langkah antisipasi apakah Bu Menteri merasa anggarannya terbatas? Atau Undang-Undang perlu kita ada revisi Undang-Undang? Atau pengawasan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan yang lainnya gitu. Jadi, saya kira ini masukan Bu Menteri ya.

Yang ketiga, mengenai masalah BRG. Nah, ini sebenarnya kita berharap Pak Nasir ya selaku Kepala BRG, penguatan. BRG ini bisa berfungsi betul-betul dari target 3 juta tadi berapa yang sudah bisa di sudah di basahi lahannya gitu karena dari pengalaman yang terbakar itu banyakan lahan gambut Pak ya? Nah itu menjadi, menjadi apa namanya sesuatu yang keberadaan BRG ini sangat kita harapkan apa namanya penguatannya. Terutama dari segi organisasinya Pak nah, itu sudah selesai ya organisasinya? Anggarannya juga barang sudah bisa mandiri gitu sehingga bisa lincah untuk menjalankan tugasnya.

Yang keempat Pak Ketua, saya mengusulkan Ketua agar ada Panja

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini yang terakhir ya Pak Andi ya?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Yang terakhir ini Pak. Ada Panja Pengawasan Hutan karena 5 tahun lalu nih kita kurang pengawasan hutannya gitu ya sementara kita tahu bahwa berapa juta hutan lindung kita, hutan apa yang menjadi sawit dan menjadi tambang Pak Ketua.

Dan yang terakhir ini Pak Ketua lagi, untuk pengawasan kita, kita minta satuan tiga dari Kementerian LHK. Bukan untuk dibahas tapi kita ingin pengawasannya dan juga kepada seluruh UPT yang Daerah Pemilihan anggota Komisi IV, Ibu bisa komunikasi karena supaya terjadi mitra dan juga pengawasan yang kuat dari Anggota DPR Komisi IV. Saya kira demikian saja Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih selanjutnya Pak Guntur. Kalau *mic* nya mati bisa pindah sedikit Pak. Siap-siap Mba Riezky. Pak Guntur tolong di belakang karena ini direkam, pindah lagi Pak. Bapak kan biasa TNI pindah-pindah tugas Pak.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Saya ulangi Bu, jadi ada langkah-langkah yang telah diperintahkan Presiden selaku Panglima tertinggi untuk menanggulangi kebakaran hutan ini kepada TNI dan Polri. Namun satu sisi landasan pijakan-pijakan hukumnya tidak ada. Yang inilah menimbulkan suatu kondisi yang kurang mendukung. Harapan kami masalah-masalah ini bisa menjadikan masuk di dalam bahasan program sehingga hal yang merawankan antar institusi maupun juga pelanggaran-pelanggaran hukum dapat diatasi seminimal mungkin. Itu saja Ibu Menteri.

Terima kasih

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Mba Riezky, tolong agak singkat karena nanti jam 14.00 kita mau Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke terima kasih Pimpinan.

Kepada Ibu Menteri beserta jajaran.

Pertama yang sangat, dari tadi sebenarnya menggelitik saya. Kementerian Lingkungan Hidup tapi hari ini kita rapat ini masih belum *paperless* ya. Ini saya tidak tahu apakah kebiasaan karena saya anak baru disini ya. Kita mau bicara deforestisasi tapi ini bahannya dari hutan ya. *Paperless, go green* kita selalu menyampaikan itu tetapi di dalam sini pun berapa banyak yang sudah dibagikan itu juga menjadi ancaman. Mohon perhatiannya atau mungkin saya yang gagal paham atas mekanisme yang ada saya mohon maaf sebelumnya.

Kedua, tadi sudah sebutkan, saya dari Sumatera Selatan dari kecil sudah terbiasa bernafas dengan asap yang ada terjadi setiap tahun tetapi makin kesini semakin parah siaga asap terjadi. Tadi Ibu bicara saya agak ini juga, dikit-dikit pidana kenapa tidak perdata ataupun administrasi. Pidana saja sanksinya tegas saja tidak bisa jalan apalagi mau perdata dan administrasi, kan begitu. Pidana itu sanksi paling tegas dari semua hukum loh tapi tidak jalan. Yang salah apa? Apakah aturannya? Atukah oknumnya? Ataukan apa? Ya, Pencegahan bukan penanggulannya saja. Pencegahan bagaimana caranya mencegah. Ini yang harus kita urut dulu dari awal. Sekian dari saya Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Mukhtarom silakan. Siap-siap Pak Sutrisno.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan Komisi IV yang saya hormati

Ibu Menteri, Pak Wamen, dan jajaran Kementerian LHK

Bapak Ibu semuanya.

Langsung saja karena Presiden ini konsen terhadap peningkatan perekonomian khususnya di bidang pertanian atau tanaman pangan dalam arti luas maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Saat ini mudah-mudahan

saya salah karena tidak *update* pemahaman saya tentang regulasi yang akhir-akhir ini muncul bahwa pengalaman untuk saat ini yang namanya air irigasi itu susah-susah sudah setengah mati karena ini juga dampak dari lingkungan dari diantara solusi dari sekian solusi adalah terbangunnya waduk, bendungan, dan yang paling kecil adalah embung. Tapi faktanya tempat-tempat strategis ini selalu di wilayah hutan. Maka bagaimana nanti kedepan ada regulasi penyederhanaan terkait dengan pembangunan waduk atau bendungan yang ada di kawasan hutan karena terus terang tanpa itu petani tidak mampu intensifikasi karena ekstensifikasi saya pikir sudah berat, yang bisa dilakukan adalah intensifikasi.

Kemudian yang kedua yaitu saran masukan terhadap LHK, Kementerian LHK agar kiranya Perhutani dalam melakukan penebangan kayu yang berdampingan atau yang berdekatan dengan waduk, ini dipertimbangkan karena kalau kayu yang ditepi bendungan atau waduk ini tidak dipertimbangkan penebangannya maka akan terjadi setiap setahun atau dua tahun kali menganggarkan bagaimana pengerukkan sedimentasi. Ini...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Izin Pak Muhtarom, maaf ganggu.

Maksudnya pohon yang dipinggiran waduk? Itu kira-kira berapa ratus meter dari waduk yang ditebang oleh Perhutani?

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Ya artinya ini saran Pak. Jadi, faktanya memang penebangan ini izin yang disekitar itu harus dipertimbangkan jangan semudahnya memberikan izin disekitar waduk atau bendungan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oke. Terima kasih.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Kemudian berikutnya, juga nanti kedepan ada penyerderhanaan aturan terkait dengan pembangunan jalan atau instalasi baik listrik maupun air yang notabene tidak nebang cuma di tepian jalan ini jangan sampai harus izin ke Menteri lagi seolah-olah ini mohon maaf terkesan seperti negara dalam negara begitu. Masa kita ini pasang instalasi air di tepi jalan tidak nebang

tegakan atau apapun harus izin, izin Menteri. Maka harapan saya ada penyerderhanaan aturan. Mungkin itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Selanjutnya Pak Sutrisno setelah itu Mba Yessy siap-siap.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bu Menteri, Para Wakil Menteri dan para Pejabat lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Saya sangat *concern* menyikapi ruang lingkup di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini karena sebagaimana telah disampaikan oleh Pimpinan bahwa bidangnya Ibu Bapak ini, ini disamping penyanggah kehidupan adalah penentu kelangsungan hidup bagi penghuni alam jagat raya ini termasuk manusia. Oleh karena itu, Dewan sudah memberikan anggaran 2019 9,1 triliun. Sampai hari ini baru sampai 5,7 triliun. Dalam kurun waktu 39 hari saya juga tidak begitu apa namanya bisa memastikan akan maksimal.

Masih baik pada bidangnya Ibu Bapak, tahun 2020 diberikan 9,3 triliun dan Presiden telah memberikan arahan karena 40 hari lagi kita akan memasuki tahun anggaran baru. Arahannya adalah dari 5 itu saya ambil 2 yang menyangkut juga bidang Bapak dan Ibu. Yaitu mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, menyederhanakan perizinan dan juga memberantas pungli dan juga hambatan lain investasi. Yang kedua, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Kemudian memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi. Kemudian memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari 14 program kegiatan, 1 untuk badan tadi. Saya belum melihat ini. Apakah rencana kegiatan yang sudah dibuat disampaikan tadi sudah disesuaikan dengan arahan Presiden? Yang kedua, dasarnya adalah Presiden telah menyampaikan misi. Dari 9 saya ambil 2. Yang pertama menyangkut lingkungan hidup adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kedua, sinergitas dengan Pemerintah Daerah. Nah dari sikap ini yang pertama menyangkut kehutanan. Dulu di bidang kehutanan itu yang di olah oleh rakyat

adalah mengolah kayu. Ada iuran hasil hutan untuk menjamin kelestarian hutan kedepan. Sekarang bukan kayu yang digarap, mayoritas menggarap mengolah tanah lewat tambang. Kalau dulu kayu diambil masih ada bonggolnya bisa tumbuh walaupun 30-35 tahun tapi sudah dirasakan dampaknya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sutrisno agak cepat dikit Pak. Terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Penting Pak saya minta mohon waktu nih. Ini sangat mendasar buat kegiatan tahun depan

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nanti tanggal 19 kita Rapat Kerja lagi dari pagi sampai tengah malam. Terima kasih. Lanjutkan Pak

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Maksud saya, saya sampaikan ini agar para Dirjen melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatannya. Apakah artinya manakala kita membahas menggunakan data yang memang perlu diperbaiki. Saya teruskan. Jadi kalau dulu ada iuran hasil hutan sekarang yang diolah adalah tanah, tambang. Pertanyaan saya adalah tanggung jawab siapa yang merusak hutan daripada proses penambangan itu pada konteks reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi? Kita belum jelas berapa uang negara bisa himpun daripada proses itu tapi kerusakan lahan sangat luar biasa. Manakala tidak dihutankan kembali harus jelas akan dimanfaatkan apa, untuk apa lahan itu?

Yang kedua, menyangkut lingkungan hidup. Ibu Menteri ini di era otonomi daerah, kebijakan Kementerian hanya Menteri yang menjalankan. Menyangkut lingkungan hidup terkait bagaimana di daerah yang akan dilakukan oleh kebijakan Kepala-kepala Daerah. Kami di daerah ini merab-rara bagaimana menindaklanjuti lingkungan hidup ini. Pemberi izin investasi adalah Kepala Daerah sehingga hati yang digunakan disini. Kompas kemarin menyebutkan pertumbuhan investasi tahun ini turun, tahun kemarin 6,96 investasi tumbuh, sekarang hanya 4,2%. Salah satu penyebabnya adalah investor sudah mempunyai tanah tapi terhambat pada perizinan karena lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu ada satu kejelasan dari Kementerian

memberikan pedoman bagi daerah, jangan menghentikan investasi cari solusi supaya investasi tetap tumbuh.

Terima kasih

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup ya Pak Sutrisno ya? Terima kasih. Selanjutnya Mba Yessy.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Oke baik, terima kasih Bapak Pimpinan Komisi IV.

Mohon izin Ibu Kementerian dan beserta jajarannya menyampaikan sedikit.

Yang pertama saya sedikit menceritakan atau memberikan pandangan tentang karhutla karena ini bagaimanapun saya dari Kalimantan Barat memang merasakan dampaknya. Asap mengganggu sistem penerbangan juga dan sebagainya. Dan saya rasa saya pikir kita semua sependapat kita semua setuju bahwa karhutla ini dan bencana asap adalah bencana nasional yang harus kita tanggulangi dengan serius. Dan yang ingin juga saya garisbawahi melihat data di tahun 2015 dan 2019 ini merupakan lahan terbakar yang terbesar kalau tidak salah saya. Dan kemudian juga saya agak tergelitik ini membahas tentang korban yang menjadi tersangkanya kasus karhutla ini. Jadi saya garisbawahi ini korban yang menjadi tersangka. Dan dalam hal ini saya secara pribadi mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam hal ini dibawah Kementerian Lingkungan Hidup sudah berani menyegel beberapa perusahaan, beberapa oknum-oknum terkait yang saya rasa sudah jelas ini mungkin izinya juga bermasalah kemudian membakar lahan di lahan gambut dan yang miris bagi saya adalah ini dituduhkan kepada petani konvensional, petani tradisional kepada masyarakat adat. Dan sejauh mana sih kebenaran masyarakat adat ini membuka lahan, berladang menggunakan lahan gambut? Ini tidak pernah terjadi di Kalimantan dan khususnya juga di Kalimantan Barat. Di jamin padi tidak akan subur tumbuh disitu. Berarti disini sudah jelas Pemerintah dalam hal ini sudah mengetahui oknum-oknum tertentu.

Dan juga saya miris sebenarnya Bapak Ibu dengan fenomena seperti ini. Kemarin saya baru mendapatkan laporan juga dari salah satu advokat di Dapil saya, ada 3 orang tersangka, sebetulnya status belum menjadi tersangka masih sebatas wajib lapor, jadi mereka ketahuan membakar lahan di tiga titik. Ini lokasinya di Kabupaten Sintang. Mungkin ini bisa menjadi bedah kasus kita karena mengingat revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ini belum jelas untuk Pasal 29 ayat 2. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Siti secara langsung. Ini

masih menjadi polemik dan masih didorong juga untuk terus direvisi. Dan sementara disini sudah agak mengesampingkan Undang-Undang ini. Kenapa saya sampaikan mengesampingkan? Karena 3 orang korban ini membakar lahan itu tidak sampai 2 hektar bahkan mereka hanya membakar setengah hektar saja. Dan ini sudah ditangkap sekarang sudah di proses di kejaksaan. Dan ini masih ingin mengikuti proses di pengadilan. Dan saya harap ini Pemerintah juga tegas bagaimana menyikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.

Dan juga saya memberikan sedikit pandangan tentang dilarang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Nah ini revisi ini boleh tetapi tetap harus memerhatikan kearifan lokal. Tetap harus memerhatikan bagaimana status sosial, bagaimana secara mental secara psikis kesiapan hidup, makan. Ini urusan perut masyarakat disana. Jadi disana mereka oke, misalkan perusahaan kita semua bisa menerapkan Undang-Undang dikenakan denda misalnya sekian sekian membakar lahan dan kemudian membuka dengan cara ramah lingkungan, dengan pola baru misalnya. Menggunakan alat berat misalnya 6 juta 1 hektar biayanya. Tetapi ketika ini kita samaratakan dengan petani tradisional, dapat uang darimana mereka 6 juta hanya untuk buka lahan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih, cukup.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik Pak. Jadi mungkin itu saja

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Teman-teman untuk pendalamannya lagi tadi sudah saya sampaikan pada tanggal 19 itu kita Rapat Kerja kembali.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Oke baik Bapak Pimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk gambaran dan pandangan kita pertama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nur'aeni. Siap-siap Ibu Endang.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan Komisi, Ibu Menteri.

Langsung, sedikit saya menanggapi yang pertama, mengingat saat ini Kementerian KLHK ini masuk dalam Kemenko Maritim dan Investasi tentu saya melihat bahwa investasi di bidang pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang lain ini cukup menjanjikan. Nah tidak menutup kemungkinan nanti kedepan mungkin banyaknya investor untuk melakukan ekspansi dalam di bidang usaha pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang lain. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama bagaimana antara investasi di bidang pengelolaan kehutanan ini juga diimbangi dengan penanaman yang baru ataupun reboisasi. Kalau saya melihat bahwa reboisasi saat ini juga kan masih cukup sedikit ya. Karena anggaran di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak signifikan. Nah ini tentu menjadi problematika kita nanti kedepan. Ini yang harus dipikirkan bagaimana keseimbangan antara Kementerian Lingkungan Hidup ditarik di Kemenko Investasi dan Maritim dengan adanya upaya melakukan penanaman pohon, reboisasi, dan bentuk yang lainnya.

Yang kedua, saya ingin menanggapi hasil evaluasi realisasi dari pelaksanaan program yang ada, dimana program-program terhadap pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung ini sangat minim untuk diserap, kurang lebih 54%. Ternyata di dalam anggaran yang disampaikan yang kami, yang saya baca bahwa dari 8 triliun yang terbesar yang masih tersisa adalah di program kegiatan pengendalian DAS dan hutan lindung. DAS ya, hutan lindung. Dimana persoalan DAS ini ya, ini cukup pelik, kompleks. Di Banten sendiri Ibu Menteri, bahwa kita ini Daerah Aliran Sungai ini cukup tercemari karena banyak industrilisasi yang melakukan kegiatan industri untuk menyemari lingkungan yang ada di sekitar kawasan itu sendiri. Tapi pertanyaannya kenapa program tersebut tidak cepat terealisasi? Ada apakah kita? Adakah persoalan yang lain sehingga Kementerian KLHK belum cukup ya untuk bisa merealisasikan ke arah tersebut.

Berikutnya adanya tumpang tindih dari sisi perizinan. Di daerah kami persoalan ini banyak sekali masuk ya. Karena saya kan kemarin di DPRD Provinsi. Persoalan izin kaitan eksploitasi tambang. Terus juga kaitan dengan pengendalian atau pemanfaatan hutan. Ini yang menjadi persoalan apakah memang izin-izin tersebut menjadi ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup

ataukah Pemerintah Daerah? Ini semua saling lempar handuk ya. Yang pada akhirnya daerah juga tidak sanggup untuk bisa mengeluarkan izin. Nah yang terjadi adanya suatu persoalan masyarakat yang semakin saling tuduh menuduh gitu ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Nur'aeni agak cepat sedikit.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik Pak, 1 lagi. Di daerah di Provinsi Banten ada program yang memang menjadi program saling sinergi ya antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana tiap daerah itu diwajibkan untuk bisa menyediakan lahan kurang lebih 5 ribu hektar. Nah terus tapi tidak diimbangi pemberian penanaman pohon. Ternyata dalam 1 hektar itu, itu diwajibkan untuk menanam kurang lebih 1 juta pohon. Nah ini mohon penjelasan

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau satu hektar ditanam 1 juta pohon nampaknya nggak cukup Bu.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Iya coba mohon masukannya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Program tersebut itu seperti itu. Mungkin demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Ibu Endang agak cepat sedikit karena Pak Menteri KKP nya 15 menit lagi akan tiba.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Bu Menteri dan jajarannya yang saya hormati.

Ada beberapa pertanyaan atau klarifikasi mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Jadi tadi tentang deforestasi. Nah bagaimana di KLHK untuk pengendalian dan penggunaan dan juga pelepasan kawasan hutan. Yang kedua tentang pemberantasan *illegal logging*. Nah apakah, bagaimana penghentian penerbitan izinnya dan strategi dari Kementerian untuk mengantisipasi hal tersebut? Yang kedua tentang kebakaran hutan. Nah mohon dijelaskan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Bu Menteri dan jajarannya mengenai hal tersebut. Nah yang ketiga mengenai sampah ini. Kebetulan banyak Ibu-Ibu disini. Jadi apakah tidak ada ide untuk membuat teknologi yang lebih canggih begitu sehingga ada truk keliling misalnya yang memisah sampah kemudian di kelola dengan baik karena Ibu-Ibu rumah tangga misalnya di komplek saya sudah mulai memisahkan sampah-sampah organik dan anorganik. Tapi hasilnya tidak begitu bagus, kenapa? Karena tidak ada peraturan ataupun strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan jajarannya untuk mengolah di lokasi-lokasi yang tidak usah ke penampungan yang lebih besar maksud saya. Jadi ada truk-truk keliling misalnya yang sudah lengkap peralatannya untuk memilah dan mengolah sehingga kita Ibu-Ibu rumah tangga itu diberi kemudahan karena kita juga sudah mulai menggalakkan dengan adanya pupuk-pupuk organik. Nah perlu ada koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bu Endang agak cepat dikit Bu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Bu Endang, ini saya jelaskan kalau di kampung saya Bapak Ibu kalau hujan itu berkah bagi ibu rumah tangga. Buang sampah nggak jauh. Cukup di depan rumah. Selanjutnya Ibu Ema, siap-siap Pak Sumail.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri beserta jajarannya.

Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dan ini juga mohon untuk lebih ada perhatian dari Kementerian LH. Sama dengan Bu Endang tadi, terkait dengan sampah yang mana *problem* yang selama ini kami hadapi di daerah terutama di Kabupaten Jombang yang mana Kabupaten Jombang ini adalah kota santi. Ada 4 pondok pesantren besar dan kurang lebih 100 pondok pesantren yang ada di pelosok-pelosok desa. Yang mana santrinya total semuanya ada puluhan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia dan setiap hari membuang sampah. Kami mohon untuk lebih diperhatikan terkait bagaimana solusi sama persis apa yang juga telah disampaikan Ibu Endang tadi. Disamping sampah-sampah dari para santri juga dari masyarakat yang luar biasa ada masalah di daerah kami. Mohon nanti apalagi sudah didukung oleh regulasi yang ada. Undang-Undang Pesantren juga sudah disahkan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kami mohon dari Kementerian LH untuk lebih diperhatikan tentang lingkungan sehat di pondok pesantren.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan lahan bekas tambang. Di daerah kami juga banyak tambang-tambang yang banyak juga memakan korban. Anak-anak kita banyak yang meninggal karena ada begitu hujan turun itu banyak yang meninggal disitu dan datanya ada di kabupaten kami. Jadi tolong nanti juga dibantu untuk bagaimana pemulihan lahan bekas tambang itu ada perhatian khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Terima kasih, itu Bapak Pimpinan yang ingin saya sampaikan.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi tadi Rapat dari pukul 10.30 diakhiri pukul 13.00. Saya minta izin kepada anggota kita perpanjang sampai pukul 14.00. Apabila tidak cukup kita tambah lagi 30 menit. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Sumail.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan, Anggota, dan Ibu Menteri beserta jajaran yang kami hormati.

Ada hal apa namanya yang kalau kita perhatikan Ibu, yang menjadi isu hangat dan tiap tahun ini saya kira ini mengemuka kaitannya dengan kebakaran hutan ya. Berdasarkan data yang ada bahwa kebakaran hutan itu banyak di lahan gambut dan ini banyak dilakukan oleh korporasi dibanding masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu ini perlu penegakkan hukum yang serius ya selain tadi adalah pencegahan. Karena kalau tidak maka pelanggaran-pelanggaran ini akan terus berlanjut.

Saya sependapat tadi dengan Pak siapa, teman yang dari Aceh itu untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang nakal yang selalu dan senantiasa karena polanya begini Pak, kebakaran hutan ini biasanya terjadi di bulan Juli dan Agustus, itu yang banyak terjadi. Artinya polanya kita sudah paham, kalau penanganannya ini *as usual* sebagaimana biasa tidak ada tindakan-tindakan atau penanganan yang apa namanya semacam keluar dari tradisi yang biasa kita lakukan maka ini akan terus seperti itu. Maka dampaknya seperti yang kita lihat saat ini. Penerbangan terganggu belum lagi tentang kesehatan dan juga dampaknya terhadap negara tetangga kita. Ini yang selalu kita protes. Sehingga terkesan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini tidak serius walaupun upayanya sudah maksimal. Untuk itu Ibu Menteri perlu dilakukan ataupun apa namanya sebuah komunikasi terpadulah antara Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sama misalnya terjadi di Dapil saya Pak. Barusan ini terjadi kebakaran di Gunung Ijen. Ijen itu satu destinasi wisata yang hanya ada 2 di dunia karena disitu ada *blue fire* nya. Penanganannya terkesan terlambat bahkan sekarang ini sudah mau mencapai 1000 hektar. Saya berharap di periode kedua ini Ibu Menteri beserta jajarannya lebih fokus lagi dan lebih semangat lagi karena ujungnya apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian untuk kesejahteraan masyarakat kita dan Indonesia yang berkemajuan. Demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Sumail.

Bu Menteri di Gunung Ijen itu taman nasional. Disana gak ada mobil pemadam kebakaran? Tapi gak punya mobil pemadam kebakaran? Saran saya di 2020 minta apabila ada APBN perubahan diajukanlah untuk mobil kebakaran termasuk Gunung Bromo dan lain-lain. Bu Menteri jangan takut

kalau minta anggaran Bu Menteri kalau tujuannya baik dan tepat sasaran. Selanjutnya Pak Suhardi Duka silakan. Siap-siap Pak Johan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Pada prinsipnya hutan dengan rakyat itu selalu saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Yang merusak hutan ini adalah orang Jakarta. Ya yang selalu menginginkan ratusan ribu hektar untuk jadi perkebunan dan lain sebagainya. Akibatnya penduduk asli di sekitar hutan itu menjadi miskin karena sumber dayanya di hutan itu ditarik semua dan penduduk aslinya tidak bisa buat apa-apa. Olehnya itu saya *support* program pengentasan kemiskinan di wilayah kawasan hutan itu menjadi bagian penting supaya tercipta keadilan di masyarakat kita. Jangan hanya pemegang apa namanya kalau HPH dulu, sekarang itu pemegang usaha hutan itu usaha perkebunan.

Saya ingin konfirmasi bahwa setelah saya Bupati, saya mengajukan pelepasan kawasan eks transmigrasi dan sudah di rapatkan di Komisi IV, disetujui, termasuk kantor Gubernur, termasuk lapangan terbang, 151 ribu hektar. Dan disetujui waktu itu kalau tidak salah 51 ribu hektar untuk dilepas dari kawasan hutan Kabupaten Mamuju. Hanya sampai saat ini saya tidak tahu kayanya belum keluar masih masuk dalam kawasan. Bayangkan lapangan terbang Bu, lapangan terbang itu masuk dalam kawasan hutan pada tahun 2000. Ya bayangkan pada tahun 2000 pada saat dilepaskan kawasan hutan di Sulawesi Selatan maka penggantinya itu di Kabupaten Mamuju. Baru penggantinya yang ditunjuk adalah lapangan terbang. Bayangkan, jadi sesuatu yang sangat luar biasa.

Saya juga akan mengajukan beberapa perbaikan aliran sungai yang berada di Sulawesi Barat khususnya untuk menanggulangi air PDAM. Ah ini penting. Yang terakhir adalah saya ingin tanyakan mengenai lingkungan hidup mengenai ekspor koral yang kemarin di Bu Susi larang. Ini kan kewenangannya lingkungan hidup. Dengan demikian harus ada sinkronisasi nanti sebentar juga akan saya pertanyakan di Menteri Kelautan karena melarang ekspor koral ini disaat kita butuh dolar. Tapi ini sesungguhnya kewenangan di Kementerian Lingkungan Hidup bukan kewenangan di

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Suhardi cukup.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi nanti kita masalah koral kita bicarakan dengan Menteri KKP yang baru. Kemudian saya jelaskan sedikit Pak Suhardi tadi masalah tukar-menukar lahan. Jadi ini terjadi Bapak Ibu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu mencakup Bangka Belitung. Jadi di tahun 80 lebih 90 apabila pengusaha mau membuka kebun sawit di Sumatera Selatan, tanah penggantinya adalah wilayah Bangka Belitung. Jadi penggantinya di Bangka Belitung karena waktu itu disana tanah sangat murah sekali sebagai penggantinya. Setahu saya di wilayah Bapak yang masuk lapangan terbang itu sudah selesai. Itu kalau gak salah 2015 atau 2000 berapa. Ya Pak ya? Selanjutnya Pak Johan silakan, singkat ya Pak.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bu Menteri, Wakil Menteri yang saya hormati

Pak Ketua.

Saya ingin mengawali dengan 3 kata kunci dari Bu Menteri. Pertama soal struktur perekonomian yang kokoh. Bu Menteri, 10,2 juta itu ada penduduk di sekitar hutan atau 36,7 dari penduduk miskin kita. Karenanya saya mencoba memberikan saran kepada Ibu agar mempercepat, mempercepat langkah-langkah penerapan dari Perhutanan sosial itu. Permudah izinnnya, kalau kurang anggarannya tambah anggarannya. Permudah buat skema-skema dan langkah-langkah menuju percepatan itu karena banyak desa di tempat saya bu, desa-desa di Sumbawa itu, itu kampung dari dulu mereka tinggal disitu tapi itu masih di kawasan hutan. Nah percepat juga misalnya permudah izin soal kelompok-kelompok sadar wisata agar bisa mengelola objek-objek wisata, air terjun, segala macam di dalam hutan. Itu yang pertama.

Yang kedua soal yang Ibu sebut tadi itu apa..hutan sosial tadi itu. Kami hanya sampai menyiapkan lahan tetapi bibit itu dari Pertanian. Pertanyaan saya adalah perhutanan sosial ini dimaksudkan untuk menjaga hutan atau merusak hutan? Kalo Ibu kasih lahan ke mereka terus bibit dikasih Pertanian jadilah sawah itu. Kan rusak hutan. Sementara kita untuk memiliki satu titik saja penguasaan hutan itu ribetnya minta ampun karena kita akan merubah tata ruang dan kehutanan itu paling sulit mengeluarkan perubahan tentang tata ruang itu.

Berikutnya perhatian, berikutnya yang ketiga Bu, SDM berkualitas dan berdaya saing. Rasio hutan dengan personil di Sumbawa itu 1:5000. Pos Gakkum nya itu, itu meliputi JaBaNur namanya, Jawa Bali Nusa Tenggara, JaBaNur. 1:5000 kalau di Sumbawa. Usul saya Bu, karena banyak kerusakan hutan ini, buatlah pos Gakkum itu di Pulau Sumbawa.

Yang ketiga soal lingkungan hidup. Teman-teman bicara lingkungan hidup soal merkuri segala macam, kalau saya belum pernah disebut oleh Kementerian Lingkungan ini adalah pencemaran akibat penggunaan pestisida pada produk pangan. Padahal inilah alasan saya Pak Ketua, untuk mempertahankan lingkungan hidup itu agar tetap di Komisi IV. Penggunaan pestisida yang berlebihan Bu, saya mengambil contoh begini ya. Bahayanya penggunaan pestidida pada produk pangan itu orang-orang kaya Bu, belanjanya di *mall*, barang masuk *mall* nya itu ada batas pestisidanya. Nah yang lebih pestisidanya itu ini dijual di pasar-pasar rakyat. Jadi orang kayanya dibuat sehat orang miskinnya kita bunuh pelan-pelan. Nah karenanya, dan ini belum masuk tadi di dalam perhatian lingkungan hidup. Kita bicara merkuri, kita bicara sampah. Sampah Bu, mohon maaf jangan kita bicara hanya di hilir bicara tentang *zero waste*, kita bicara tentang sampah plastik, pengaturan bank sampah segala macam. Saya sudah pernah melakukan itu Bu tapi kita tidak pernah berani untuk menghentikan produksi plastik di Indonesia ini. Kita mau mengatur penggunaan segala macam bank sampah itu kalau tidak menghentikan produksi plastik, percuma *non sense* saya pernah Bu di kawasan Taman Nasional

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Johan agak cepat dikit ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Di kawasan Taman Nasional ya. Kawasan Nasional Rinjani. Saya kumpulkan para *porter* Bu, saya beli sampahnya. Tetapi itu tidak bisa

menyelesaikan persoalan karena plastik itu setiap hari di *supply* kepada pedagang-pedagang di tingkat masyarakat.

Jadi terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Bu Alien Mus, silakan. Setelah itu siap-siap Ibu Luluk yang baru datang. Coba tolong di belakang di *check* dulu hidup nggak? Ah pindah kebelakang saja Bu Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS):

Baik terima kasih. Terima kasih Ketua.

Izin Bu Menteri.

Saya Alien Mus ingin menyampaikan bahwa dari tadi teman-teman sudah menyinggung tentang karhutla. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di Provinsi Maluku Utara pernah terjadi tumpang tindih izin untuk pertambangan dan untuk HGU penebangan pohon. Ini masalah. Terus juga sampah yang berlebihan di daerah kelautan juga gak bisa kita pungkiri kalau Ibu kesana di Pulau Ternate mau menyebrang ke Ibukota Provinsi saja yang kita jalan bukan air laut tapi juga sampah-sampah yang bertebaran di seluruh perairan permukaan daerah-daerah tersebut. Kesadaran untuk sampah ini perlu juga kita masukan sebagai pengenalan kepada anak-anak usia dini. Misalkan kita memberikan salah satu kurikulum seperti BNN juga untuk bisa menjadi dasar pengetahuan tentang kesadaran sampah ini sangat bermasalah.

Saya ingin menyampaikan juga Bu ini kan kita sekarang ada di Ibukota Jakarta. Polusi udara yang kita hirup di Ibukota kita yang tercinta ini untuk sekarang saja untuk posisi hari Rabu jam 1 lewat ini kita diangka 159 AQI atau penyebaran polusi yang tidak layak dihirup oleh masyarakat atau rakyat atau kita semua yang ada di Kota Jakarta. Ini polusi Bu, ini juga sangat-sangat mempengaruhi untuk kesehatan kita yang ada di Ibukota Jakarta ini.

Terus penggunaan air tanah yang regulasinya juga pun belum tahu nih DKI Jakarta regulasi penggunaan air bawah tanah ini seperti apa. Dengan begitu banyak penduduk yang ada di Ibukota Jakarta ini berarti penggunaan air bawah tanah berarti semakin besar. Yang saya *check* di situsny bahwa yang terdaftar hanya 2000 lebih, yang tidak terdaftar hampir 1000 lebih untuk penggunaan air bawah tanah.

Dan juga saya ingin sampaikan kepada kita semua, saya tahun 2018 bulan Desember kemarin mengalami hal yang sangat kurang ini untuk anak saya dan keluarga saya. Ternyata air yang digunakan kita sehari-hari ini tidak layak untuk di konsumsi dan tidak layak untuk digunakan untuk mandi. Ada beberapa daerah yang perlu di DKI Jakarta ini yang perlu kita *check* Bu, ini apa berarti pencemaran air di Ibukota kita ini perlu di apa namanya di atensi besar selain sampah plastik, selain itu juga yang paling penting bagi kehidupan kita adalah air. Bagaimana kita mau menjadi memberikan kontribusi yang baik buat negara kita ini kalau memang air kita saja sendiri itu tidak layak untuk digunakan. Mohon atensinya Bu, Pak agar bisa kita tuh hidup lebih sehat lagi terutama di Ibukota ini sebelum pindah ibukotanya. Kita memberikan kebersihan lah, meningkatkan kebersihan dan kelayakan hidup Ibukota kita Jakarta.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup ya, Bu Alien ya?

F-PG (ALIEN MUS):

Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Mba Luluk silakan. Kalau bisa 1 menit lebih baik.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih.

Ibu Menteri, Pak Wamen dan semuanya.

Saya ingin menyoroti mudah-mudahan tidak mengulang karena tadi mohon maaf harus menerima kelompok nelayan yang di fraksi terkait dengan impor limbah Ibu. Saya ada data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bahwa hingga Oktober 2019 jadi ini masih gres banget. Indonesia telah menerima 2.194 kontainer limbah sampah. Kemudian dari catatan Nexus, tiga ini NGO, International juga terdapat 58 peti kemas yang berasal dari Amerika Serikat berisi limbah yang mengandung bahan berbahaya B3 dan kemudian yang terkontaminasi limbah plastik campuran pada September 2019. Kemudian 12 dari 58 peti kemas itu sudah dikembalikan ke Amerika tetapi sisanya, nah ini masalahnya Ibu yaitu dialihkan

ke negara lain. 38 diantaranya dialihkan ke India, 3 ke Korea, dan masing-masing satu peti ke Thailand, Vietnam, Mexico, Belanda, dan Kanada yang mereka itu bilang bahwa tidak tahu menahu mengapa kemudian mereka harus menerima kiriman limbah sampah itu yang sebenarnya di Indonesia.

Nah kemudian pengiriman limbah sampah ini yang seharusnya dijanjikan oleh Pemerintah Pak Jokowi ini dikirimkan ke negara asal yang mengespor tapi kemudian pertanyaannya mengapa kemudian justru dialihkan ke negara yang lain? Mengapa tidak kirimin balik ke Amerika? Sementara dibawah Konvensi Basel, Indonesia harusnya mengambil kembali atas ekspor ulang pengiriman limbah ilegal. Nah ini kita mohon penjelasan dari Ibu apalagi beberapa waktu yang lalu yang lama kan sebenarnya publik juga dicengangkan dengan adanya limbah ini. Indonesia aja sudah darurat sampah kok kemudian kita menerima limbah sampah. Alih-alih ini sampah yang bisa digunakan tapi justru limbah yang berbahaya.

Kemudian kalau merujuk juga Badan Pusat Statistik pada sampah kertas impor yang masuk ke skala nasional saja sudah 1 koma juta ton. Kemudian juga Peneliti *Ecological Observation and Wetlands Conservation* juga mengatakan bahwa impor limbah kertas sebenarnya tidak jadi masalah kalau memang ini menjadi kebutuhan pabrik-pabrik kertas untuk di daur ulang. Tapi ya itu tadi, campuran berbahayanya lebih banyak daripada kertasnya. Nah saya kira ini penting untuk dibahas bersama Ibu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Bu Luluk

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Nah yang terakhir Bapak. Ini terkait dengan gambut. Saya 2013 ikut International Peatland Conference di Sweden Bapak. Dimana salah satu isunya menurut mereka agak sedikit heran dengan Indonesia karena Bukit Siam yang di Kampar itu kan cagar biosfer dunia tetapi kemudian tata kelolanya, manajemennya, dan *governance* nya itu silang sengkabut antara pihak *privat* waktu itu ada Sinarmas kemudian dengan pihak Pemerintah kemudian juga dengan pihak kaya LIPI gak tau siapa yang harus *handle* dan seterusnya sehingga meskipun cagar biosfer itu sudah ditetapkan sebagai bagian dari warisan UNESCO kalau tidak boleh diluruskan tetapi justru tidak bisa maksimum. Nah saya kira ini BRG Pak karena ini baru pasti jadi perhatian yang utama. Terus yang kedua, di dalam konferensi ini kita juga punya pengetahuan baru bahwa selama ini kita tidak bayangkan bahwa sumber

karbon terbesar itu sebenarnya kan dari Peatland ya Pak ya. Kemudian selain dia punya makna secara ekonomis tetapi kan juga mempunyai sumbangan yang lain yaitu aspek *society* nya dari ada ekonomi, kemudian ekologi, ada *society*. Nah kita mau masyarakat lagi-lagi dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan termasuk ketika ada ide mau jualan karbon. Itu masyarakat itu ngerti gak kalau kemudian ada *trading* karbon?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Mba Luluk cukup ya.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nanti kita minggu depan panjang lagi.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Salam. 2 jam ya. Terima kasih.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Pak Yadi kalau bisa jangan lebih dari 1 menit, setelah itu Pak Hermanto 1,5 menit. Terima kasih.

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Masalah lingkungan hidup Bu Menteri, masalah Citarum di Dapil saya. Apalagi Citarum dulu pernah dinyatakan sungai terkotor di dunia katanya, memang kenyataan benar ya. Maka sepanjang Bandung, Bandung Barat 30 kilo pinggir sungai Citarum itu kan pabrik semua Bu sehingga pembungan limbah-limbah langsung di Citarum. *Alhamdulillah* setelah Presiden turun

tangan dan menugaskan TNI terutama Pangdam III Siliwangi semua pabrik yang nakal-nakal itu ditegur lah. Kadang aliran-aliran yang ke Citarum itu dibeton semua Bu sehingga *alhamdulillah* gak ada, mending ya sungai Citarum itu. Cuma masalahnya saya kemarin dari Jumat Sabtu menyusuri Citarum sampai ke hulunya, Cisanti, sedang diperbaiki, diperlebar, diperdalam tapi belum selesai Bu ke daerah hulu itu. Saya takutkan kalau hujan bulan ini, ini akan berbahaya sekali karena di sungai Citarum juga sedang perbaiki masih numpuk tanah-tanah dan lain sebagainya, itu lah yang saya khawatirkan ya. Dan sekarang juga masalah Citarum kalau besok sudah diperbaiki tapi ke atasnya hutan itu masih gundul Bu. Jadi, saya kira jadi akan takut jadi mubazir Citarum yang diperbaiki dengan triliunan ya ternyata hutan diatasnya masih gundul, DAS-DAS Citarum sehingga nanti bisa tidak ada manfaatnya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Yadi.

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ini masih 15 lagi yang penanya. Selanjutnya Pak Hermanto tadi saya sudah kasih waktu 1,5 menit.

Terima kasih

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Sudin kali ini baik banget.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bu Menteri, saya ingin supaya Kementerian bersama Badan Restorasi Gambut memiliki satu *grand design* tentang pembangunan sektor kehutanan dan amanat terbesar dari *grand design* itu adalah bagaimana mengurangi *gap*, *gap* dalam hal ini adalah keuntungan *benefit* terbesar yang diraih oleh kelas masyarakat kita dari hasil hutan itu adalah masyarakat kota sementara masyarakat yang hidup di sekitar hutan itu cenderung jumlah kemiskinannya meningkat. Jadi saya minta nanti *grand design* nya kea rah kesana dalam hal bagaimana mengurangi *gap* ini dengan postur program yang lebih banyak kepada masyarakat-masyarakat di sekitar hutan.

Kemudian yang kedua, saya minta juga ada satu *road map* yang jelas selama 5 tahun kedepan. Apa target-target secara konkrit untuk mengurangi jumlah orang yang miskin ini sehingga kita jelas apa yang mau kita kerjakan karena ini adalah daripada amanat Undang-Undang Dasar kita. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi jangan nanti kita, rakyat disuruh menanam, disuruh memperbaiki disuruh reboisasi, tapi yang ngambil untung orang kota. Yang ngambil untung para pengusaha. Yang melakukan kebakaran hutan pengusaha tetapi penegakkan hukumnya kepada rakyat kecil. Nah saya pikir ini terlalu timpang sekali.

Nah terkait dengan lingkungan juga di wilayah kami di dapil itu ada namanya kawasan Alahan Panjang, disitu yang namanya kebutuhan plastik, saya pikir menurut data yang tersedia sekarang ini adalah kebutuhan plastik yang terbesar, tertinggi di seluruh kawasan di Indonesia. dan kebutuhan terhadap pupuk non organik yang tertinggi disana. Sehingga kalau kita lewat disana hampir banyak tumpukan-tumpukan plastik dan bau daripada pupuk-pupuk non organik. Saya pikir nanti Kementerian Kehutanan nih bagaimana mengurangi jumlah kebutuhan plastik dan juga ada satu strategi bagaimana masyarakat itu diberi cara pupuk yang organik. Nah ini adalah aspirasi dari masyarakat disana. Saya minta nanti Bu Menteri ini bisa jadikan satu program.

Kemudian saya minta juga Bu Menteri dalam masa kerja awal ini setidaknya-tidaknya selama 100 hari kedepan pertama Bu Menteri bisa mengurangi jumlah miskin di masyarakat sekitar hutan. Yang kedua Bu Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Hermanto agak dipercepat Pak. Bapak sudah bicara 4,5 menit. Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Oh dihitung ya? Kemudian yang kedua saya minta supaya ini mengantisipasi hujan yang sebentar lagi akan tiba itu pasti akan ada bencana di hampir setiap titik di sudut negeri ini. Saya pikir Bu Menteri sudah punya datanya dimana titik-titik yang akan terjadi bencana. Ini perlu diatasi. Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Selanjutnya Pak Kiyai Asep, silakan.

F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum, wassalamu 'ala manittaba'al huda.

Saya lebih banyak menyoroti dari materi ya Pak. Pertama, setelah ada kalimat membangun lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, peningkatan kualitas ketersediaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Saya pikir bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi Bu, bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi dasar kebutuhan hidup makhluk hidup manusia. Jadi waktu masalah faktor ekonominya sih *bodo* tapi yang penting orangnya itu yang bisa menikmati daripada air itu. Dalam hal ini saya berharap atau juga boleh dibilang mengusulkan ada sebuah program yang sifatnya masif, nasional, yakni Gerakan Pembuatan Lubang Biopori. Ternyata masyarakat masih banyak yang belum paham apa itu lubang biopori. Jangankan bergerak, paham saja enggak. Maka dalam hal ini karena air yang ada dari hujan itu kebanyakan apalagi sekarang banyak perumahan-perumahan, bangunan-bangunan itu tanahnya tertutup. Begitu hujan turun langsung ke kali langsung ke laut tidak diserap di bumi, di tanah. Nah dengan lubang biopori ini diharapkan tanah, air hujan itu bisa diserap dengan baik. Dan hal lain di lubang biopori ini juga masyarakat mempunyai pupuk sendiri dari limbah dapurnya.

Selanjutnya hal ini juga diharapkan dari Kementerian ada bantuan dimana bantuan ini bukan hanya sekedar bantuan dalam bentuk fisik tetapi juga dari bentuk pendidikan khusus melalui beberapa Lembaga-lembaga pendidikan, LSM, atau juga PKBM, atau bahkan melalui majelis ta'lim dan grup arisan. Dan bantuan juga berupa bantuan alat dalam membuat apa namanya pembuat biopori atau juga pembuatan bagaimana cara membuat kebun drum atau kebun barel. Yang dimana disitu limbah dapurnya bisa menjadi pupuk kembali dan kembali lagi kesitu dan kebutuhan air juga akan sangat bagus. Sampah dapur dan organik akan tercipta dengan baik.

Selanjutnya tentang revolusi mental. Peduli, menurut saya nih, dalam alam, masalah revolusi mental ini peduli dan sadar akan *go green*. Dalam kehidupan sehari-hari semisal kampanye mengganti kantong plastik, mereka kurang paham, tidak paham. Yang lucunya lagi sekarang ini ada perusahaan contoh ada yang membuat sedotan langsung dari logam dibuat di beberapa toko untuk mengganti sedotan air. Tapi lucunya juga wadahnya masih tetap

plastik juga. Nah ini cukup bagus. Ada baiknya kalau mereka juga dibikin sadar mampu mengganti kantong-kantong plastik itu dengan kantong-kantong yang mudah berubah, kembali menjadi tanah. Semisal kantong yang terbuat dari mendong dan sebagainya.

Satu lagi Pak, satu lagi. Tentang DAS Citanduy Pak, pasca Meletus gunung Galunggung dulu di daerah Priangan Timur para petani tuh ada yang mampu sampai 3 kali tanam padi. Sekarang ini untuk 2 kali saja susah karena irigasinya tidak terpelihara bahkan ada yang mati. Terakhir sekarang ini ada di gas Citanduy ini ada bendungan Cikeris ini diharapkan irigasinya bisa diperbaiki dan juga dibuat yang baru.

Terima kasih.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Selanjutnya Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bu Menteri beserta jajarannya.

Pertama, sedikit saja Bu Menteri berkaitan isu kebakaran hutan mungkin sudah semuanya sudah menyampaikan. Mungkin yang perlu, saya tadi melihat beberapa hal berkaitan keberadaan polisi hutan ini Bu Menteri. Kalau kita lihat di sebelah kiri Bu Menteri, agak kelihatan di sebelah kiri Bu. Kalau kita lihat luas hutan kurang lebih 125 juta hektar, saya lihat disini baru sekitar 2 ribu polisi hutan yang ada di Dirjen KSDAE. Ini seperti apa keberadaan dari polhut-polhut ini? Terus terang karena sangat penting keberadaan polisi hutan. Karena kita lihat hampir di seluruh jarang kelihatan Bu. Kalau kita lihat di luar negeri kan jelas Pak, muncul. Tapi ini gak pernah terkesan nggak pernah kelihatan. Padahal ini sangat kita butuhkan apalagi dengan kebakaran hutan yang sebenarnya bukan problem baru. Setiap tahun ini terjadi, ini harus ada langkah-langkah konkrit.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan persoalan AMDAL Bu, ini terus terang khususnya di daerah saya ada beberapa perusahaan-perusahaan ini bermasalah terus. Ini mau lapor kemana ini? Kita lapor ke Pemda daerah juga nggak solusi. Jadi mungkin harus ada satu regulasi yang harus dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup biar jelas. Jadi sehingga masyarakat mau

lapor kemana? Hari ini terus terang masyarakat terus jadi korban. Ini mungkin menjadi catatan Bu.

Yang terakhir saya pikir berkaitan dengan kasus kawasan ekosistem Leuser Bu. Ini cukup luar biasa, dari sekitar 2.418 kasus Pak. Masalah pembalakan kemudian perambahan hutan, ini mungkin nanti data bisa saya serahkan ke Bu Menteri. Ini terus terjadi padahal itu sudah menjadi lumbung dunia ini Pak Ketua. Mungkin kita sekali-sekali perlu ke Gunung Leuser. Ini menjadi perhatian. Karena saya lihat disini ini terus meningkat kasusnya. Pembalakan hutan, kenapa ini sangat dampak terhadap lingkungan.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. Selanjutnya Pak Sunarna. Silakan, siap-siap Pak Panggah.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Saya sedikit saja Pak Ketua mungkin terlalu banyak. Jadi Bu Menteri yang jelas kami hanya akan menyampaikan masalah kepengurusan AMDAL jadi perizinan AMDAL tuh kadang-kadang makan perlu waktu yang begitu lama. Presiden menyampaikan bahwa kita perizinan harus cepat, 14 hari selesai. Tapi AMDAL bisa setengah tahun, bisa sampai satu tahun. Jadi itu bisa, para pengusaha itu bisa mondar-mandir ke Provinsi ataupun ke Kabupaten itu yang tentu ini sangat mengganggu juga dalam rangka percepatan investasi di negara kita. Mungkin itu begitu merasakan di daerah mungkin para Bupati, para Gubernur. Pak Gubernur pun biasanya langsungnya ke Pak Kepala Dinas yang begitu memang sulit menghadapi mereka. Jawab pun juga kadang-kadang asal-asalan Bu “Ya ditunggu saja memang begitu proses perizinannya”. Perizinannya ini yang perlu membawa dampak yang luas.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Selanjutnya bahwa kita banyak membicarakan masalah penghijauan hutan, peremajaan hutan kembali. Hutan ini kan nggak begitu kelihatan. Yang kelihatan sekarang yang jauh beda mungkin Ibu Menteri yang saya hormati bahwa jalan-jalan dari baik jalan pusat, jalan provinsi, jalan kabupaten itu semuanya kanan kirinya saja sekarang pohon saja sudah jarang. Menteri

PUPR memperlebar jalan, enggak nanem lagi. Provinsi memperlebar jalan enggak nanam pohon lagi. Itu saja yang sering dilihat masyarakat saja tidak ditanami apalagi yang luasan hutan yang begitu. Bagaimana bahwa yang gerakan-gerakan dari reboisasi mungkin dari Kementerian Lingkungannya juga kelihatan bahwa gerakannya selama ini kan gak begitu kentara Ibu. Mungkin di setiap provinsi, apa tiap kabupaten. Juga kabupaten-kabupaten tuh kebanyakan kan inisiatif sendiri Bu dalam rangka membuat hutan di perkotaan mungkin kami, saya mengharapkan Ibu Menteri *concern* juga dalam pergerakan penataan kota bukan kita hanya memikirkan *road map* nya untuk ibukota baru tapi ibukota setiap kabupaten provinsi yang sudah ada ini bagaimana juga bagus penyerapan polusi bagus, tanamannya terukur. Seberapa banyak sih harus ada jumlah tanaman setiap Kabupaten atau Kecamatan, atau Provinsi

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Sunarna agak cepat dikit.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Siap cepat. Ini saya baru setengah detik kira-kira Pak.

Jadi mungkin itu Pak Ketua. Selanjutnya saya hanya menyarankan bahwa apa yang sudah saya sampaikan di papir ke Bu Menteri kami sangat mengharapkan prioritasnya mana Pak Ketua. Maksud saya Bu Menteri, prioritasnya mana Pak Sekjen prioritas dari program yang ada tadi. Prioritasnya apakah hijau, merah, kuning apakah ditandai apa. Jadi besok keberhasilan dan tidaknya yang prioritas itu kita lihat Pak Ketua. Jadi kalau prioritasnya tidak berhasil apa yang tidak prioritas. Mungkin itu Bu Menteri. Sedikit saja saya sampaikan. Mohon maaf ada kurangnya.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Sunarna. Selanjutnya Pak Panggah silakan. Siap-siap Pak Yohanis Fransiskus Lema

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih.

Pak Ketua, Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian.

Kami menyambut baik ini dengan dimasukkannya 3 kata kunci di dalam RPJMN 2020-2024 dimana memang sudah benar ini tepat bahwa 3 kata kunci ini menjadi fokus daripada program-program di LHK. Karena memang hutan sebagai sumber daya anugerah tuhan ini memang betul-betul harus disadari sebagai suatu kekuatan kita yang tidak ada duanya di dunia. Bahkan Brazil saja yang sama-sama kaya akan hutan tapi tidak seunik dan sepotensi negara kita. Sehingga nih saya kira jangan sampai disia-siakan.

3 kata kunci itu adalah struktur perekonomian yang koko, mendukung struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan komparatif wilayah dan SDM berkualitas dan bersaing. Nah memang dalam pelaksanaannya ini pengalaman dengan Pak Bambang juga nih ya. Ini masalah koordinasi nih, ini supaya kedepan saya mengharapkan adanya suatu sinkronisasi antar Kementerian yang apa ya, erat dan semangat sama gitu. Nah ini, ini saya kira penting ini kedepan sehingga kita bisa optimal memanfaatkan potensi dan mendorong struktur perekonomian kita. Nah ini saya pikir tadinya di Kementerian Perekonomian Bu, di Pak Airlangga gitu ya. Saya pikir kalau karena kaitannya ke perekonomian nih sangat luas. Kita tahu ya dengan Kementerian Perindustrian begitu banyak yang irisannya. Yang kadang-kadang *dispute* terus terang saja agak keras gitu sama, mohon maaf Bu. Jadi yang lalu memang kita agak cukup keras tapi ini kita mengharapkan sebenarnya kalau ada di Kemenko ini, sebenarnya selesainya di Kemenko semuanya ini *dispute-dispute* ini. Nah ini kami mohon Ibu tetap meskipun itu secara anu ada di Kemenko Matirim tapi mungkin Ibu lebih banyak nanti orientasinya ke Kemenko Perokonomian. Ini kami bisa bantu nanti dari Komisi IV untuk bisa mendinginkan suasana dan mensinkronkan antar Kementerian terus terang disitu.

Yang kedua, ini saya dari Dapil ini,

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang kedua terakhir ya Pak Panggah ya

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Iya terakhir, terakhir ini. Jadi saya dari Dapil Temanggung, Wonosobo ini adalah pusat daripada industri *bare core*. Nah ini sebenarnya industri yang luar biasa karena bisa menggerakkan perekonomian perdesaan secara nyata adanya pengolahan *bare core* ini. Hanya ini gak berindustri gitu sekarang. Jadi siapa pembinanya, seperti apa dibinanya, akibatnya ini tumbuh menjamur, *over supply*, dan akhirnya banting-bantingan harga sekarang industri ini

collapse. Nah saya pergi ke industri-industri ini mereka kebingungan ini harus kemana ini nya terus terang ini. Ke perindustrian enggak, tapi sebenarnya pembinaannya ada di LHK. Ini mohon jadi Pak Bambang mesti jadi perhatian dan ini harus ada solusi. Mereka akan bergerak ke hilir ke *plywood*, ke panel dan lain-lain. Nah mari kita sama-sama nanti Pak Bambang kita gimana solusinya karena ini betul-betul industri yang sudah nyata hadir di perdesaan dan menggerakkan ekonomi perdesaan secara masif. Saya kira itu saja Pak Ketua.

Terima kasih. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Selanjutnya Fransiskus Lema. Tolong agak cepat karena ini masih ada 7 penanya lagi.

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bu Menteri saya singkat saja. Bagi saya semua Kementerian itu harus punya perspektif lingkungan hidup dalam pengertian punya hirauan dan keberpihakan yang kuat pada lingkungan hidup. Tadi disebutkan laju deforestasi itu menggila di negeri kita dan saya perhatikan deforestasi hari ini itu mulai bergeser ke Indonesia bagian timur karena faktor pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan perkebunan monokultur. Saya ingin tahu apa kebijakan dan juga aksi implementasi konkrit yang dilakukan oleh Kementerian Ibu Siti Nurbaya terkait dengan upaya antisipasi hal ini. Yang yang kedua tentu tidak bisa parsial sendiri, harus juga berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

Yang kedua soal sertifikasi lahan, tadi sudah sempat disinggung oleh teman-teman yang lain. Kita tahu bahwa ini merupakan salah satu Program Prioritas Presiden Jokowi sejak periode pertama dan memberikan hasil yang sangat baik. Kementerian Ibu sudah memberikan lahan dan kemudian di sertifikasi dan kita yakin, kita berharap setelah itu akan ada aksi yang ada tindakan yang sifatnya produktif. Saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya koordinasi antara 3 Kementerian ini, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian ATR tadi. Karena di banyak kasus saya temukan itu setelah tananya di sertifikasi mereka juga tidak bisa berbuat apa-

apa karena punya begitu banyak keterbatasan akhirnya kemudian dijual karena sudah punya sertifikat, harga jualnya semakin mahal. Peruntukannya tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Padahal reforma agraria tujuan dasarnya itu untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Haerudin tadi sudah bicara 2 kali. Jadi kalau mau bicara 1 menit cukup.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Bapak Ketua Sudin yang maha bijakasana ini.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Pimpinan, Anggota yang terhormat.

Ibu Menteri beserta seluruh jajaran, Ibu Menteri, Bu Wamen di LHK yang juga saya hormati. Ibu Menteri, Bapak Wamen mohon maaf.

Ingin kami sampaikan pertama, bahwa pusat kerusakan hutan kita itu adalah keserakahan dan wujud keserakahan itu adalah kapitalisme. Komitmen kita yang pertama Bu Menteri, Pak Wamen, apa kita sudah punya kesiapanan dan memang sudah memantapkan diri melawan kapitalisme itu? Saya khawatir kalau koordinasi Kementerian hari ini, LHK ada di bawah investasi, itu yang akan merusak kita. Saya ingin komitmen Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya bahwa moratorium hutan yang bulan Agustus 2019 Pak Jokowi permanenkan, itulah bagian dari komitmen kita. Karena deforestasi yang terjadi dari 5 ribu hektar lebih sampai hari ini 130 ribu hektaran penurunannya itu terjadi dan itu efektif.

Yang kedua Ibu Menteri, saat kita mendengar tadi bahwa kita melakukan proses pencerdasan masyarakat-masyarakat sekitar hutan dalam bahasa kajian kita itu disebutnya itu *illiterate society* jadi masyarakat yang di putus kecerdasannya, pengetahuannya tentang hutan tentang lingkungan yang masyarakat itu sendiri bagian dari pasukan yang *unorganized* yang merusak hutan itu sendiri dan kita ingin bahwa Kementerian juga ada programnya bagaimana pencerdasan mereka, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar hutan kita.

Yang ketiga yang menyebabkan kerusakan itu adalah kemiskinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ketiga terakhir ya Pak Haerudin ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Iya ini, ini yang 3 hal tadi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya, terakhir ya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Yang terakhir, nah yang ketiga ini lah bagaimana juga kita antara 2 kombinasi mana hutan yang harus permanen di jadi hutan tutupan, hutan lindung. Mana yang memang harus diolah menjadi hutan produktif agar membantu proses percepatan kesejahteraan rakyat kita.

Saya ingin sampaikan firman tuhan yang agung dalam surah Al Baqarah ayat 11 "*A'udzu billahi minasy syaithonir rojiim, Bismillahirrahmanirrahim*". Izin Pak Ketua Sudin. "*Wa idzaa qiila lahum laa tufsiduu fiil ardhi qaaluuu innamaa nahnu mushlihuun. Jika dikatakan pada mereka "Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi" dan yang tadi saya katakan itu menjawab "kami ini pembuat kebijakan yang membuat kebaikan" padahal hutan rusak terus. Allah menegaskan lagi "Alaa innahum humul mufsiduuna wa laakillaa yasy'uruun, "catat mereka itu adalah sebenarnya yang membuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya". Jadi ini rekayasa rusaknya hutan dari kerakusan mari kita lawan bersama-sama.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih tausiahnya Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bapak memang sangat bijaksana sekali.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Bambang. Pak Bambang, 1 menit cukup karena besok Bapak mau pulang ke Kalimantan bersama Pak Dedi.

Terima kasih.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Siap Pimpinan.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan hadirin yang berbahagia.

Terkait dengan karhutla, terkait juga dengan, dengan kemiskinan dan persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. Utamanya adalah ingat kesejahteraan dan desa-desa yang dekat dengan hutan ini rata-rata masih miskin dan kesenjangan transmigrasi ini semakin lebar, ini akan menjadi persoalan utama tetapi ketika kita mau menangani desa-desa setempat ini yang dekat dengan hutan, desa-desa ini masih masuk kawasan hutan produksi. Ini sudah pernah kami usulkan tahun 2009 tapi hingga saat ini belum terealisasi dan ini akan sangat mengganggu pembangunan di desa-desa setempat karena akan berhadapan dengan Undang-Undang Kehutanan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Bambang tolong dijelaskan apa yang diusulkan supaya Ibu Menteri.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Jadi untuk menangani desa-desa setempat ini tentu perlu komitmen bersama antar berbagai lintas Kementerian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apa yang akan dilakukan disana coba nanti supaya dimasukkan di Satuan Tiga sehingga kami bisa kontrol kembali karena akses manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Saya mau sampaikan dan saya tidak lagi ulang apa yang disampaikan oleh teman-teman karena sangat cukup banyak. Pertambangan di Maluku khususnya di Kabupaten Buru itu semuanya ilegal tapi masih tetap saja dioperasikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Ah kita berharap agar izin soal masalah lingkungan itu harus kita lebih tegas, itu agar kegiatan-kegiatan terkait dengan pertambangan ilegal di Buru itu harus segera dihentikan.

Yang kedua, soal izin HPH, IPK dan lain-lain sangat cukup banyak. Saya cuma mau usulkan saja, usulkan saja bahwa saya juga pernah memberikan izin, baik saya memberikan tanda tangan. Sudah kurang lebih hampir 20 tahun. Kalau di tanam durian atau mangga itu maka satu Maluku itu saya kira gak mampu untuk menikmati. Tapi kalau ditanamin kayu kita sudah bisa prediksi bahwa kayu itu diameternya sudah berapa. Ah, kalau kita tahu diameternya sudah berapa berarti kita bisa prediksi bahwa hutan kita ditebang berapa dan yang sudah reboisasi berhasilnya tingkatan sampai berapa persen.

Saya cuma mengharapkan mungkin ada satu regulasi atau pikiran-pikiran itu agar kita dapat mendapatkan data *real* sehingga bicara soal masalah kehutanan, bicara soal perkebunan, bicara soal kepentingan kesejahteraan masyarakat ini bisa terwujud. Saya kira sementara demikian Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Kristantus Kurniawan. Tolong singkat ya. Setelah itu siap-siap yang terhormat temannya Ibu Menteri, Pak Fadholi.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih

Yang saya hormati Pimpinan

Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI

Ibu Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata

Jadi kami DPR ini Bu, kalau *ndak* ngomong rakyat marah. Karena dibayar mahal-mahal duduk disini memang harus ngomong. Walaupun harus ngulang yang teman sampaikan tadi. Jadi daritadi bicara strategi, kalau menurut saya kebakaran hutan terjadi setiap tahun jadi tidak ada strategi lagi. Yang ada sekarang pencegahan, langung *action*. Oleh sebab itu, saya mengusulkan langsung *action* saja Bu. Yang pertama seperti disampaikan Wakil Pimpinan tadi Pak Didi Mulyadi, ini ada tarik menarik kepentingan. Pertama, kepentingan ekonomi yang kedua kepentingan dunia usaha. Ini 2 sisi yang sulit ketemu. Oleh sebab itu saya pikir strateginya yang pertama adalah seperti Ibu sampaikan tadi koordinasi yang intens dengan Kementerian Pertanian karena sulit kalau kami orang Dayak di Kalimantan Barat tidak bisa dilarang untuk bakar ladang. Apalagi dibatasi dengan 2 hektar. Kalau dia mampu tebas ladang sampai 3 hektar, 4 hektar ya 4 hektar dibakarnya. Tetapi selama ini terjadi mereka menjadi kambing hitam. Sekarang sampai hari ini masih banyak orang-orang peladang berpindah yang dipenjara. Sementara yang membakar lahan pelaku dunia usaha. Apalagi Ibu sampaikan tadi kan satu partai Menteri. Gampang koordinasi Bu. Cuma menurut saya jangan disebut di sini Pak Ketua. Partai Menteri tidak ada partai.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Habis Pak Krisantus, disini gak ada Menteri dari partai disini adalah Menterinya kabinet Pak Jokowi.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Ya jadi tidak ada partai, *ndak* boleh disebut disini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cuma bagusnyanya kan saya katakan Pak Fadholi sahabatnya Ibu Menteri.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Kalau kita dewan ini memang ada partai ada fraksi. Ah jadi kemudian yang berikutnya saya pikir Kementerian Kehutanan ambil tindakan tegas saja nanti Komisi IV saya sependapat dengan teman-teman tadi Pak Ketua, kita panggil saja perusahaan-perusahaan pembakar ladang itu, pembakar lahan.

Kalau di Kalimantan Barat yang membuat kebakaran terjadi besar-besaran adalah pelaku usaha yaitu perusahaan tetapi yang ditangkapi oleh polisi, oleh tantara, warga masyarakat ladang berpindah-pindah yang hanya membakar sekian hektar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Kristantus.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Cukup. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi tadi Anda mengatakan kok ditempat Anda yang banyak membakar ada juga perusahaan?

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tolong kasih data serahkan kesini, segera kita panggil.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Ada data. Jadi sampai hari ini belum diproses perusahaan itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya, datanya kasih nanti kita panggil.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Lewat Pimpinan Pak Sudin?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Atau kalau perlu kita adakan spesifik lagi.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Saya yakin dengan Pak Sudin sebagai Ketua, nih Ketua kami ini sangat tegas dan arif bijaksana tentu ini bisa segera kita tangani.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tambah uang makannya.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Selanjutnya Pak Fadholi. Silakan Pak Fadholi. 1 menit ya Pak Fadholi ya.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Bapak Ketua dan Bapak Ibu Anggota yang saya hormati.

Bu Menteri yang saya hormati.

Yang pertama tentu saya akan menyampaikan ungkapan terima kasih dan mengharapkan kepada Bu Menteri salah satu Menteri yang bisa melanjutkan ke yang kedua kalinya ini artinya bahwa kerjasama selama ini antara Bu Menteri dengan Komisi IV ini yang sudah sangat bagus sekali untuk bisa kita tingkatkan. Dengan tidak dengan tentu memperhatikan saran dan sumbangan saran dan pemikiran dari semua teman-teman anggota Komisi IV.

Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang pertama kaitannya dengan program-program yang sudah dibahas bersama dan ini sudah pada penghujung akhir di tahun 2019 ini sekiranya masih ada hal-hal yang memang belum terlaksanakan sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan anggota jadi segera mungkin bisa di realisasi

Dan yang kedua ini dengan sekaligus bersama dengan teman-teman anggota baru ini tentu nanti bersama lewat Pak Sudin ini biar segera diperjelas saja karena masing-masing tabel ini kan sudah mempunyai program dan lain-lain sehingga apa yang memang bisa diperjuangkan di dapil masing-masing ini biar segera nanti bisa diketahui untuk tahun anggaran 2020 menjadi 1 bagian yang sangat penting untuk bisa kita kerjakan bersama-sama karena mungkin bagi yang lama ini kan sudah tahu program-programnya tapi bagi teman-teman yang baru ini kan memang belum tahu apa yang bisa kita lakukan di secara *action* apa yang bisa kita lakukan disamping satu masukan-masukan tadi yang sudah sangat bagus tadi. Nah berikutnya adalah

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Akhiri ya Pak, Pak Fadholi terakhir ini.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Terakhir? Oh iya.

Nanti kita ini saja, sebetulnya masih banyak tetapi tentu akan ada pertemuan berikutnya yang saya sampaikan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nanti tanggal 19 saya kasih waktu Pak Fadholi setengah jam.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Nah, saya cocok sekali dengan itu. Makanya saya ucapkan terima kasih. Jadi pada prinsipnya mengingat, memulai kemesraan yang lebih baik dengan Anggota-anggota dan semuanya adalah baru sekalipun ada yang stok lama. Terima kasih Pak Sudin Ketua Komisi IV, sahabatnya Bu Menteri juga.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya sama Bu Menteri bukan sahabat tapi satu kampung, satu kampung halaman.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Satu kampung mesti harus sahabat, masa satu kampung

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan sahabat. Lebih dari sahabat kalau satu kampung. Selanjutnya silakan Pak Budi. Yang terakhir nanti menyampaikan kanjeng mantan Dirjen.

WAKIL KETUA/F.GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Bu Menteri dan jajarannya

Saya cuman mungkin mendorong ada 2 isu saja. Yang pertama karena ini ada keterkaitannya dengan dapil saya yaitu rencana pemindahan ibukota negara. Kami beberapa bulan terakhir ini benar-benar dititipkan oleh masyarakat Kalimantan Timur untuk mengawal lingkungan hidup, alam Kalimantan Timur yang begitu kaya ini bisa dijaga baik-baik. saat lihat ini adalah kesempatan bagi kita bersama ya untuk memantai pemulihan daripada lahan-lahan di Kalimantan Timur yang rusak dan mungkin Kalimantan lainnya yang juga banyak terdampak juga. Ini yang saya maksud adalah tambang-tambang batubara ya kita ingin nanti mendengarkan sama-sama mengawasi progres reklamasi atau penanaman kembali areal-areal yang sekarang sudah banyak gundul. Kita ingin kekayaan alam di bumi nusantara ini termasuk di Kalimantan Timur ini kita bisa jaga karena kekayaan, keanekaragaman hayati yang ada di dalam tanah Indonesia ini begitu luar biasa.

Saya rasa ini PR kita bersama Ibu. Tolong nanti kita dilibatkan dalam pengawasan kedepannya dan ini terkait juga poin saya kedua mengenai peningkatan kualitas lingkungan hidup. Saya dorong, saya *support* program-program yang ingin Ibu kembangkan, catatan saya dari Dirjen-Dirjen maupun Eselon-Eselon pagu anggaran tahun 2019-2020 ini banyak kenaikan ya khusus konservasi sumber daya alam ekosistem, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan ini ada kenaikan-kenaikan anggaran. Saya rasa tapi ini semua perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Ini kalau kita mau benar-benar menjaga, merehabilitasi lingkungan hidup alam kita yang rusak ini kita perlu bantuan anggaran lebih besar lagi.

Jadi komitmen saya, Bu Menteri dan jajarannya 5 tahun kedepan ini harus kita perjuangkan. Anggaran KLHK ini harus naik supaya hutan lingkungan hidup kita ini benar-benar bisa kita lestarikan, kita jaga bersama. Terima kasih. Saya rasa itu dari saya.

Terima kasih

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Budi.

Kalau bicara anggaran nanti kebetulan di Komisi IV, siapa yang Banggar ini? Ah ini ada Banggar, ada Banggar. Jadi minta tolong apabila memungkinkan 2020 ada APBNP tolong dinaikkan, ditambahkan pagunya.

Iya selanjutnya, kanjeng silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bu Menteri tadi saya dapat tugas dari Pak Ketua dan Pak Sulaeman untuk menerima tokoh adat Papua sebanyak 30 orang selama kurang lebih 2 jam pertemuannya. Temperamen cukup tinggi tapi *alhamdulillah* doa-doa kita bahwa orang Papua nih, tokoh adat merasa tidak dihargai dalam hal pemanfaatan lahan untuk kebun HPH dan yang lain. Bahkan dikatakan banyak pemalsuan dokumen yang dilakukan aparat dan ini sudah mengadukan kepada Kementerian LHK, izin-izin sebelum Bu Menteri menerbitkan ini sebelum Ibu ternyata belum ditanggapi. Yang intinya *alhamdulillah* saya memberi saran dan akan kami sampaikan disini. Jadi para tokoh adat menerima. Yang pertama Pak Ketua, saya merekomendasi bahwa seluruh perusahaan di Papua diundang antara lain Grup Korindo

Yang kedua diminta juga kita kunker spesifik meninjau kebun-kebun yang ada disana yang bermasalah. Yang ketiga, kita bertemu dengan pejabat daerah dari Gubernur dan Bupati dan ini disetujui oleh pihak adat dan beliau minta waktunya tidak terlalu lama. Ya jadi saya kira Pak Ketua hari ini saya akan menyerahkan berkas yang dibawa sedangkan data kebun dan nama PT nya yang bermasalah sedang disusun akan disampaikan menyusul. Maka izinkanlah saya dengan Pak Sulaeman saya akan menyerahkan berkasnya ke Bu Menteri. Pak Sulaeman kepada Ketua Komisi IV.

Dan mengenai pribadi saya sebagai anggota dewan, mohon maaf Bu saya tidak memberikan masukan. Akan kami berikan sebanyak-banyaknya masukan khusus demi kemajuan keberhasilan Kementerian LHK pada waktu yang akan datang.

Terima kasih.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Izin Ketua menyerahkan berkasnya

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Silakan-silakan.

Izin. Teman-teman Anggota, Pak Hasan minta waktu 1 menit katanya.

Terima kasih

F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih, 1 menit.

Saya sebenarnya tadi mau saya *transfer* ke Pak Sulaeman selaku Kapoksi karena ada tugas terpaksa saya bicara sendiri. Ada 1 hal Bu Menteri dan segenap jajaran, dari sekian program itu bagaimana LHK memasukkan untuk mengedukasi calon pemimpin yang hari ini sudah kelihangan budaya yang tidak sama dengan kedua orang tuanya atau sesepuhnya. Lakukan dari program sekian program ratusan miliar ini ke Lembaga pendidikan khususnya Pondok Pesantren. Karena di Pesantren itu sebagaimana dari rekan kita menyampaikan ada sebuah masalah yang tidak mampu ditangani oleh Yayasan atau Pondok Pesantren. Disana ada anak-anak kita calon pemimpin yang mampu nanti kita berikan sebuah pembelajaran bagaimana pengendalian, pengelolaan sampah dan limbah di Pondok Pesantren itu sendiri. Sebagaimana komitmen Pak Menteri Pertanian nah kemarin sudah ada mencantumkan bagaimana program Kementan itu masuk pada lembaga pendidikan bukan hanya Pondok Pesantren tentunya, lembaga pendidikan yang punya asrama.

Sekian terima kasih, *insyaallah* setengah menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua, Bu Menteri.

Dalam rapat internal kami, kami sudah memutuskan tidak ada jawaban tertulis. Tapi hari ini karena waktunya mepet, jawaban tertulis dan harus nanti dibacakan secara lisan. Jadi tertulis dan lisan disampaikan pada tanggal 19, Raker yang akan datang. Yang mungkin tadi kan para Eselon I, Eselon II sudah mencatat

Bapak Ibu yang kami hormati

Dalam dialog diskusi saran dan masukan anggota Komisi IV sebelum acara ini kita akhiri, kami bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Tolong ditayangkan.

Kesimpulan atau keputusan Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai program jangka pendek dan rencana Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melaksanakan seluruh program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan lingkungan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Anggota gimana? Bu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Izin Ketua, kami mohon dikoreksi. Jadi dana, menerima penjelasan KLHK mengenai program jangka panjang dan jangka menengah

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oh dan jangka menengah, tambahkan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Jangka panjang dan jangka menengah serta rencana program prioritas. Sudah ada disitu? Kementerian KLHK tahun 2020. Setelah KLHK nya ada 2020. Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai program jangka panjang dan jangka menengah serta rencana Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Selanjutnya Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melaksanakan seluruh program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan lingkungan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ketua, terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kedua, Komisi IV DPR meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data indikasi areal kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan, data reklamasi tambang, dan data reklamasi pantai di seluruh Indonesia dalam waktu 1 minggu setelah dilaksanakan rapat kerja hari ini. Anggota?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua, menambahkan mungkin Ketua. Data perusahaan mungkin. Kalau tadi kan indikasi, nggak jelas itu ya. Indikasi dan mungkin juga perusahaannya Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Gini Pak Andi nanti kan dari sini kan data itu dikasihkan beserta nama perusahaan dan lokasinya. Gimana Bu Menteri setuju?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ketua mohon izin. KLHK tidak mengelola reklamasi tambang. Di dalam PP 78 itu ada 2, ada reklamasi ada yang rehabilitasi. Jadi kita hanya dimintakan rekomendasi dan areal-areal untuk mereka tanam. Tetapi reklamasi tambang termasuk dananya, langkah-langkahnya, perusahaannya itu adanya di EDSM. Kemudian yang reklamasi pantai juga kita gak ikutan tetapi seluruhnya itu ada KKP. Yang sawit saya kira memang tanggung jawab kami. Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau begitu dihapus.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Pak Ketua, Pak Ketua. Interupsi.

Bu, maksudnya tambang-tambang ilegal di kawasan hutan mungkin, gitu yang

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan, ini tadinya Pak Budi memasukkan reklamasi tambang yang sudah selesai ditambang. Ini kan banyak pengusaha tambang banyak yang nakal. Yang penting hasilnya saya ambil, lingkungannya *masa bodo*. Ya kalau gitu nanti kalau memungkinkan kita Rapat Gabungan dengan Kementerian ESDM untuk menanyakan bagaimana setelah tambangnya diambil, sisanya mau diapakan? Kan gitu Bu Menteri ya? Jadi dihapus saja reklamasi tambang dan reklamasi pantai.

Jadi Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data indikasi areal dan data perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia dalam waktu 1 minggu setelah dilaksanakan rapat kerja hari ini. Jadi mungkin datanya kami terima pada saat rapat kerja akan datang. Setuju Bu Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

Ketiga, Komisi IV DPR Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi dan validasi dalam bidang data bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ATR/BPN. Kemudian Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah memiliki data tunggal yang sudah disepakati yang akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Anggota? Bu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Mohon izin Ketua, saya tidak bisa membayangkan yang dimaksud ini seperti apa?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi, Bu Menteri

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Sebab, berarti harus di *check* dulu. Contohnya kalau boleh apa misalnya?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Misalnya gini, di Kementerian Pertanian. Kementerian mengeluarkan data hasil produksi jagung PaJaLe (Padi, Jagung, Kedelai) sekian, sekian sekian, tetapi sangat berbeda sekali dengan data yang dikeluarkan oleh BPS.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kita di LHK tidak punya data seperti itu Ketua

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi datanya darimana Ibu Menteri? Bahwa datanya, bahwa data hutannya yang rusak sekian apa itu dikelola sendiri atau BPS?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kita punya rencana, istilahnya rencana kerja RKTN Ketua, itu memang berdasarkan Undang-Undang 41 saya kira, ... kok. Itu memang dari waktu ke waktu divalidasi selama 5 tahun. Jadi BPS dapatnya dari kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan BPS.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

BPS tidak pernah melakukan sensus untuk hutan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukankah harusnya BPS sebagai Badan Pusat Statistik?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Boleh Ketua mungkin di *adjust* saja kalimatnya bahwa kami harus menjajaki bersama BPS tentang keselarasan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Atau bukan menjajaki. Koordinasi.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Mengkoordinasikan tentang keselarasan data bersama BPS. Tapi mohon izin Ketua, hampir tidak mungkin kalau bersama ATR/BPN karena beradu pasti kalau nggak di Undang-Undang, kalau nggak di peradilan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya paham, kalau dengan ATR/BPN Ibu selalu gak sinkron karena ya kita tahu lah. Jadi, ATR/BPN nya dihapus kemudian koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Cepat dikit.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Boleh izin Ketua, jadi bunyinya melakukan koordinasi mengenai data lingkungan hidup dan kehutanan kepada BPS untuk baru diterusin, jadi melakukan koordinasi kepada BPS berkenaan dengan data-data. Koordinasi dengan BPS disebutin saja langsung, karena langkah yang akan saya lakukan adalah langsung kerjasama BPS. Kita sudah punya kerjasama juga Ketua, dengan BPS jadi itu langsung bisa melangkah segera dengan arahan ini. Jadi melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik berkenaan dengan data atau kalau mau disebut validasi saya kira oke, validasi data.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Itu berkenaannya salah tulisannya.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Berkenaan dengan validasi data bidang, jadi jangan evaluasi. Berkenaan dengan validasi data bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data yang dikeluarkan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Untuk keperluan, untuk keperluan mendorong Pemerintah untuk keperluan adanya data tunggal dan seterusnya. Data tunggal yang sudah disepakati yang akan menjadi dasar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Anggota bagaimana? Bu Menteri.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya poin ke-4, Komisi IV DPR RI akan melaksanakan kunjungan kerja spesifik terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya Komisi IV meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memindaklanjuti rekomendasi yang akan diberikan oleh tim kunjungan spesifik dimaksud untuk kemudian dilakukan pembahasan dan diambil keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat.

Bu Menteri, besok kunjungan ini Komisi IV juga mengajak Dirjen Perkebunan. Jadi kita sertakan juga Dirjen Perkebunan agar kebun-kebun swasta yang bermasalah bisa diambil tindakan dengan rekomendasinya. Anggota setuju? Bu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Mohon izin, untuk pengambilan keputusan berarti mungkin selain RDP bisa ditambahkan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya setuju. Setuju Bu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terkahir, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti masukan dan pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja hari ini berupa jawaban tertulis dan dijawab secara lisan oleh setiap Eselon I terkait dalam Rapat Kerja berikutnya. Anggota setuju? Bu Menteri?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ketua saya mohon izin. Kalau gak salah aturan atau konfensi bahwa kalau dengan Eselon I namanya bukan Raker tetapi RDP atau mungkin saya menyerahkan saja kepada mekanisme di DPR

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Gini Bu Menteri, nanti pada Rapat Kerja, Ibu datang tetapi yang menjawab para Eselon I yang terkait. Karena kalau Ibu yang menjawab semua nanti ada 38 penanya Bu. Bagi-bagi tugas lah. Setuju ya Bu?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terakhir, sebelum menutup Rapat Kerja ini kami persilakan Saudari

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Ketua, interupsi sebentar

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Iya Pak silakan Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pertama minta komitmen yang urusan disampaikan Pak Andi Akmal tentang Satuan Tiga untuk kita baca dan kita ketahui dan yang kedua kita minta nomor yang bisa dihubungi setiap Eselon I.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Untuk apa minta nomor *handphone*?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Rakyat saja boleh apalagi kita Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Oiya. Jadi nanti hubungannya mintanya sama LO saja, LO sudah ada nomor Ibu Menteri beserta Eselon I lainnya. Jadi jangan juga merepotkan Ibu Menteri suruh nulis nomor *handphone* Eselon I nya ya.

Silakan Ibu Menteri menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua, terima kasih

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Yang kami hormati Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pertama pemahaman bahwa begitu beratnya persoalan lingkungan yang kita hadapi dan atas berbagai pandangan dan saran-saran berdasarkan situasi riil di lapangan yang kami perhatikan dengan baik. Saya juga tadi mencatat ada 38 halaman. Terima kasih banyak atas catatan-catatan konkrit dan kami akan tindaklanjuti sesuai dengan arahan, keputusan, dan mekanisme dalam Rapat Kerja ini. Terima kasih sekali lagi, kurang lebih mohon maaf dari kami, Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian LHK. Kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Shalom, Om santi santi om.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Saudari Menteri, dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan atau kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*. Rapat Kerja kami tutup.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

(RAPAT DITUTUP: 14.30 WIB)

Jakarta, 6 November 2019

An. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001